



RENCANA KERJA

PERUBAHAN

2025

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN DEMAK



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Kyai Jebat No. 35 Demak Kode Pos 59511

Telepon (0291) 685715 Faximile (0291) 685935

Pos-el : dinperkim.demakkab.go.id Laman : dinperkim.kabdemak@gmail.com

Demak, April 202

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Verifikasi Rancangan
Perubahan Renja Tahun 2025

Kepada :
Yth. Kepala Bapperida
Kabupaten Demak
di-
Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 362 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah melalui Bappeda untuk diverifikasi. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini dengan hormat kami sampaikan permohonan Verifikasi Rancangan Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun 2025. (Terlampir).

Demikian permohonan ini, atas kesediaannya kami sampaikan terima kasih.

Plt. KEPALA DINPERKIM
Kabupaten Demak

Ir. NANANG TASUNAR D.N, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670210 199303 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Daerah..... 25

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 28

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 32

2.5. Review terhadap Renja 2025 33

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 45

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINPERKIM

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional..... 56

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 58

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan 62

4.2. Program Prioritas dan Rencana Implementasi..... 82

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan Penting..... 87

5.2 Kaidah Pelaksanaan 87

5.3 Rencana Tindak Lanjut..... 88

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 TW 1 Kabupaten Demak.....	12
Tabel 2.2	: Evaluasi pelaksanaan program prioritas tahun 2025 ...	26
Tabel 2.3	: Pencapaian Kinerja Pelayanan DINPERKIM Kabupaten Demak	29
Tabel 2.4	: Review terhadap Renja Tahun 2025 Kabupaten Demak	35
Tabel 2.5	: Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Demak	46
Tabel 3.1	: Target Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025	61
Tabel 4.1	: Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Kabupaten Demak	64
Tabel 4.2	: Rumusan Rencana Program Prioritas dan Rencana Implementasi Tahun 2025 sesuai Renstra Tahun 2021 - 2026.....	84
Tabel 4.3	: Rumusan Rencana Program Prioritas dan Rencana Implementasi Tahun 2026 sesuai Program Unggulan Bupati Periode 2025 – 2029	86



BAB I

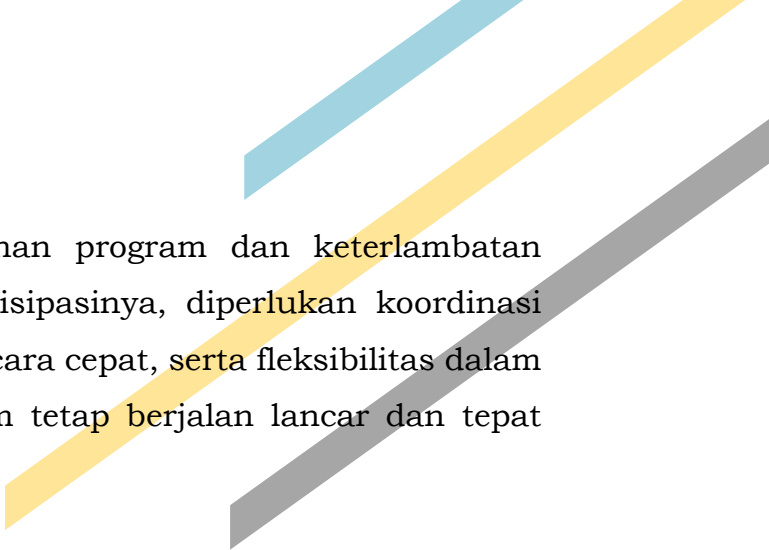
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk menyesuaikan rencana kerja perangkat daerah dengan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan yang berjalan. Penyusunan perubahan Renja bertujuan untuk memastikan rencana kerja perangkat daerah tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah, serta mendukung konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya seperti Perubahan RKPD, Renstra, dan proses penyusunan Perubahan APBD. Dengan latar belakang ini, substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami sebagai bagian dari upaya penyesuaian yang strategis dan terarah.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan penyesuaian terhadap dokumen Renja yang telah disusun sebelumnya, yang dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal perencanaan, perubahan kebijakan nasional maupun daerah, atau adanya keadaan darurat yang mempengaruhi capaian kinerja dan pembiayaan. Penyusunan Perubahan Renja dimulai dengan identifikasi kebutuhan perubahan oleh masing-masing perangkat daerah, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sebelumnya serta hasil musrenbang dan koordinasi lintas sektor. Perubahan Renja menjadi bahan utama dalam penyusunan Perubahan RKPD, karena RKPD merupakan penjabaran dari rencana kerja seluruh perangkat daerah. Perubahan Renja tetap mengacu pada arah kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, kecuali jika dilakukan perubahan Renstra karena dinamika strategis. Sinkronisasi dilakukan untuk menjamin keselarasan antara program pusat dan daerah, khususnya yang didanai oleh APBN. Perubahan Renja juga mempertimbangkan sinergi lintas daerah dalam rangka mendukung pembangunan wilayah yang terintegrasi.

Tahun 2025 berada pada masa transisi perencanaan jangka menengah, sehingga penyusunan Perubahan Renja menghadapi tantangan dalam penyesuaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan. Kondisi ini

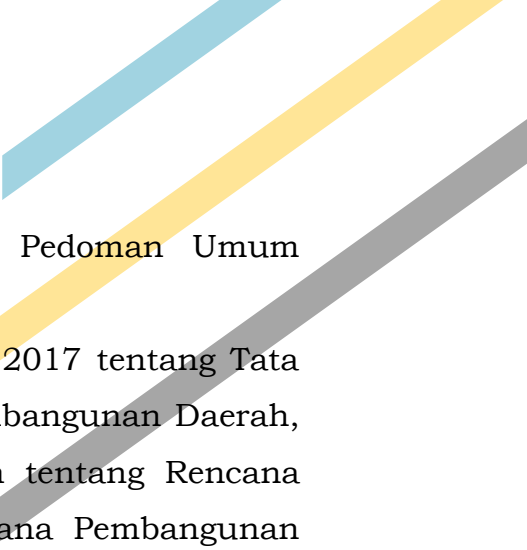


dapat berdampak pada ketidaksinkronan program dan keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Untuk mengantisipasinya, diperlukan koordinasi yang intensif, penyesuaian kebijakan secara cepat, serta fleksibilitas dalam perencanaan agar pelaksanaan program tetap berjalan lancar dan tepat sasaran.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

- 
- Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
 20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

- 
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2045;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025;
 27. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak;
 28. Peraturan Bupati Demak Nomor 76 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak;
 29. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
 30. Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025;
 31. Peraturan Bupati Demak Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025;

- 
32. Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025;
 33. Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak (DINPERKIM) ini adalah untuk mengetahui perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh DINPERKIM dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak adalah :

1. Penyesuaian terhadap pelaksanaan Program dan kegiatan hasil evaluasi pada Triwulan I tahun 2025 yang telah dilaksanakan;
2. Memberikan gambaran informasi mengenai regulasi serta kebijakan dan strategi yang menjadi landasan penyusunan program pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak;
3. Memberikan gambaran informasi kondisi capaian pelayanan dan permasalahan yang terkait dalam ruang lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak;
4. Memberikan gambaran Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak untuk mencapai target pelayanan pada tahun 2025 dengan memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
5. Sebagai pedoman untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) penunjang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025 serta pedoman penyusunan Perubahan

Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKAP-PD) Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun 2024 disusun sesuai sistematika yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika Perubahan Renja DINPERKIM;
BAB II	Hasil Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 Bab ini menguraikan tentang kondisi pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak, dan evaluasi pelaksanaan Renja 2025;
BAB III	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Memuat tentang Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025;
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Memuat Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun 2025 dan Perubahannya beserta kerangka pendanaannya.
BAB V	Penutup Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II.

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DINPERKIM dan Capaian Renstra DINPERKIM

Evaluasi pelaksanaan Renja DINPERKIM tahun 2025 sampai dengan triwulan I dan Capaian Renstra DINPERKIM tahun 2021 – 2026 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 sampai dengan triwulan I. Mengacu Visi dan Misi Kepala Daerah dalam RPJMD Tahun 2016-2021, evaluasi dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dari capaian tahun 2025 sampai dengan triwulan I dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya, dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2025, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak mengampu 5 (lima) Program, 15 kegiatan dan 38 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Terdiri dari 8 Kegiatan dan 23 Sub. Kegiatan, sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 2) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

5. Administrasi umum perangkat daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 8) Dukungan Pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan mebel
- 2) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

7. Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

8. Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Pemeliharaan Mebel
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

B. Program Pengembangan Perumahan

Terdiri dari 4 Kegiatan dan 9 Sub. Kegiatan, sebagai berikut:

1. Pendataan Penyedia dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

- 1) Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
- 2) Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
- 3) Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota

2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

- 1) Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
- 2) Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator

3. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

- 1) Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
- 2) Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
- 3) Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota

4. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

- 1) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik

C. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Terdiri dari 1 Kegiatan dan 3 Sub. Kegiatan, sebagai berikut:

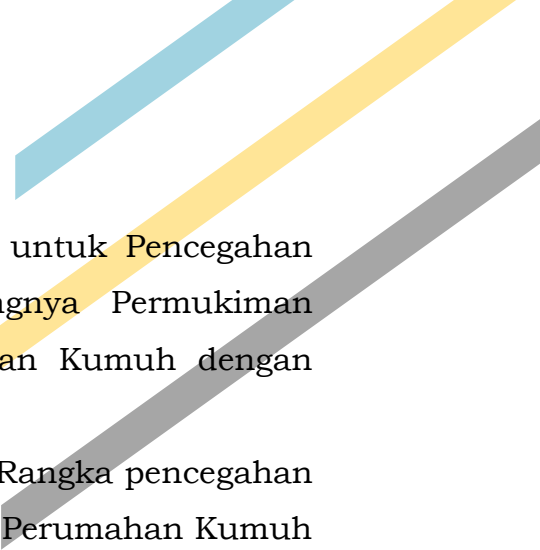
1. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian, Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan, Permukiman Kumuh
- 2) Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
- 3) Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh

D. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Sub. Kegiatan, sebagai berikut:

1. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

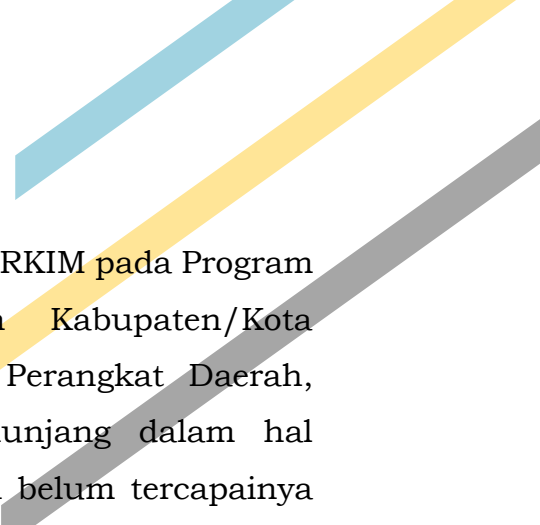
- 
- 1) Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 - 2) Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru

E. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PSU

Terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub. Kegiatan, sebagai berikut:

1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

- 1) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian



Pada Triwulan ke - 1, capaian kinerja DINPERKIM pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencapai 62,5% pada Administrasi Umum Perangkat Daerah, belum terlaksananya beberapa urusan penunjang dalam hal penunjang urusan pemerintah menjadi alasan belum tercapainya target. Pada Program Pengembangan Perumahan mencapai 5% pada rehabilitasi rumah bagi korban bencana, hal ini terjadi karena belum optimalnya pelaksanaan identifikasi korban bencana yang berhak untuk mendapat pelayanan. Program Kawasan Permukiman telah mencapai 100% pada penanganan wilayah kumuh dibawah 10 Ha, capaian ini terwujud sejak Tahun 2024 sebesar 6,38 Ha , sehingga pada Tahun 2025 tidak ada lagi kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani DINPERKIM. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki capaian sebesar 33,59%, belum optimalnya dalam sinkronisasi data penerima pelayanan menjadi salah satu faktor penghambat. Pada Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilias Umum (PSU) belum memiliki capaian atau 0%, hal ini disebabkan karena penyesuaian perencanaan dengan perubahan standar perbelanjaan di lingkungan Kabupaten Demak.

Pada Tahun 2025, DINPERKIM Kabupaten Demak memiliki pagu anggaran senilai Rp 65.657.640.900,- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, anggaran DINPERKIM telah terealisasi senilai Rp 2.569.202.761,- atau sebesar 3,91%. Realisasi tersebut meningkat pada terserapnya gaji pegawai, administrasi umum perangkat daerah, tagihan listrik, air dan telpon, dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

Dalam pencapaian kinerja dan anggaran tahun 2025, ada beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya:

1. Kendala coortex yang berpengaruh pada proses pencairan
2. Proses pengadaan barang dan jasa terhambat dikarenakan adanya perubahan sistem dari *e-katalog* ke toko *daring* tiser

Tabel 2.1.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 TW 1
Kabupaten Demak

Perangkat Daerah : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Lembar :

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Kondisi Akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
									Target Renja Tahun 2025	Realisasi s/d Triwulan I 2025	Tingkat Capaian (%) s/d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan IV tahun 2025	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV tahun 2025 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
					(Urusan Wajib atau Pelayanan Dasar)									
					Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
1	4	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
1	4	1	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	10 Dokumen	20 Dokumen	10 Dokumen	3 Dokumen	30 %	10 Dokumen	30 Dokumen	300%
1	4	1	201	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	- Dokumen	- %	3 Dokumen	9 Dokumen	300%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Kondisi Akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
									Target Renja Tahun 2025	Realisasi s/d Triwulan I 2025	Tingkat Capaian (%) s/d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan IV tahun 2025	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV tahun 2025 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
1	4	1	201	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	4 Dokumen	8 Dokumen	4 Dokumen	- Dokumen	- %	4 Dokumen	12 Dokumen	300%
1	4	1	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	6 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100 %	3 Laporan	9 Laporan	300%
1	4	1	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100%
1	4	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/b ulan	66 Orang/b ulan	31 Orang/b ulan	31 Orang/b ulan	100 %	31 Orang/b ulan	97 Orang/bu lan	312,90%
1	4	1	202	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	49 Dokumen	50 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	51 Dokumen	104,08%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Kondisi Akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
									Target Renja Tahun 2025	Realisasi s/d Triwulan I 2025	Tingkat Capaian (%) s/d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan IV tahun 2025	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV tahun 2025 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
1	4	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan								
1	4	1	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi	2 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	- Laporan	- %	2 Laporan	6 Laporan	300%
1	4	1	203	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	- Laporan	- %	2 Laporan	6 Laporan	300%
1	4	1	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 Laporan	200 %	100 Laporan	- Laporan	- %	100 Laporan	300 Laporan	300%
1	4	1	205	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	304 Orang	176 Orang	76 Orang	- Orang	- %	76 Orang	252 Orang	87,89%
1	4	1	205	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	20 Orang	-	5 Orang	- Orang	-	5 Orang	5 Orang	25%



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Kondisi Akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
									Target Renja Tahun 2025	Realisasi s/d Triwulan I 2025	Tingkat Capaian (%) s/d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan IV tahun 2025	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV tahun 2025 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
1	4	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	200 %	100 %	62,50 %	62,50 %	100 %	100 %	300%
1	4	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	1 Paket	- Paket	- %	1 Paket	4 Paket	80%
1	4	1	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	3 Paket	300%
1	4	1	206	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	1 Paket	- Paket	- %	3 Paket	6 Paket	120%
1	4	1	206	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	1 Paket	- Paket	- %	3 Paket	6 Paket	120%
1	4	1	206	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	50 Dokumen	94 Dokumen	10 Dokumen	2 Dokumen	20 %	10 Dokumen	104 Dokumen	208%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Kondisi Akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
									Target Renja Tahun 2025	Realisasi s/d Triwulan I 2025	Tingkat Capaian (%) s/d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan IV tahun 2025	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV tahun 2025 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
1	4	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	4 Laporan	80%
1	4	1	206	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	16,67 %	6 Dokumen	18 Dokumen	300%
1	4	1	206	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	9 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	8 Dokumen	88,89%
1	4	1	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	39 Unit	69 Unit	8 Unit	- Unit	- %	8 Unit	77 Unit	197,43%
1	4	1	207	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18 Unit	31 Unit	3 Unit	- Unit	- %	3 Unit	34 Unit	188,89%
1	4	1	207	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	32 Unit	5 Unit	- Unit	- %	5 Unit	37 Unit	284,61%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Kondisi Akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
									Target Renja Tahun 2025	Realisasi s/d Triwulan I 2025	Tingkat Capaian (%) s/d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan IV tahun 2025	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV tahun 2025 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
1	4	1	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	100 %	200 %	100 %	100 %	100 %	300 %	300 %	100%
1	4	1	208	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.120 Laporan	5715 Laporan	2060 Laporan	260 Laporan	12,62 %	2060 Laporan	7775 Laporan	95,75%
1	4	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25 %	12 Laporan	48 Laporan	80%
1	4	1	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara	100 %	200 %	100 %	33,33 %	33,33 %	100 %	300 %	300%
1	4	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	42 Unit	21 Unit	21 Unit	100 %	21 Unit	63 Unit	300%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Kondisi Akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
									Target Renja Tahun 2025	Realisasi s/d Triwulan I 2025	Tingkat Capaian (%) s/d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan IV tahun 2025	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV tahun 2025 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
1	4	1	209	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	194 Unit	388 Unit	194 Unit	- Unit	- %	194 Unit	528 Unit	300%
1	4	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	300 Unit	150 Unit	- Unit	- %	150 Unit	450 Unit	300%
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi rumah tangga korban bencana/relokasi program	100 %	100 %	100 %	5 %	5 %	100 %	100 %	100%
1	4	2	201		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Data Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana atau terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	15 Dokumen	9 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	33,33 %	3 Dokumen	12 Dokumen	80%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Kondisi Akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
									Target Renja Tahun 2025	Realisasi s/d Triwulan I 2025	Tingkat Capaian (%) s/d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan IV tahun 2025	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV tahun 2025 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
1	4	2	201	3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	- Dokumen	- %	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
1	4	2	201	4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
1	4	2	201	7	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1 Dokumen	- Dokumen	- %	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1	4	2	202		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Cakupan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana / Relokasi Program	100 %	200 %	100 %	50 %	50 %	100 %	100 %	300%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Kondisi Akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
									Target Renja Tahun 2025	Realisasi s/d Triwulan I 2025	Tingkat Capaian (%) s/d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan IV tahun 2025	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV tahun 2025 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
1	4	2	202	1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Suka relawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kabupaten/Kota	30 Orang	1600 Orang	300 Orang	28 orang	9,33 %	300 orang	1900 orang	6333,33%
1	4	2	202	4	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	30 Orang	15 Orang	6 Orang	- Orang	- %	6 Orang	21 Orang	70%
1	4	2	203		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jml rumah layak huni bagi korban bencana yang dibangun dan direhab	997 Unit Rumah	909 Unit	172 Unit Rumah	10 Unit Rumah	5,81 %	172 Unit Rumah	1081 Unit Rumah	108,42%
1	4	2	203	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	650 Unit Rumah	677 Unit	200 Unit Rumah	10 Unit Rumah	5 %	200 Unit Rumah	877 Unit Rumah	134,92%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Kondisi Akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
									Target Renja Tahun 2025	Realisasi s/d Triwulan I 2025	Tingkat Capaian (%) s/d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan IV tahun 2025	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV tahun 2025 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
1	4	2	203	4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	209 Unit Rumah	179 Unit Rumah	30 Unit Rumah	- Unit Rumah	- %	30 Unit Rumah	209 Unit Rumah	100%
1	4	2	203	11	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jml rumah khusus / rumah sementara beserta PSU yang dibangun	242 Unit	53 Unit	10 Unit	- Unit	- %	10 Unit	63 Unit	26,03
1	4	2	206		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Rekomendasi izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang dikeluarkan	100 %	200 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300 %	300%
1	4	2	206	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	3 Dokumen	60%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Kondisi Akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
									Target Renja Tahun 2025	Realisasi s/d Triwulan I 2025	Tingkat Capaian (%) s/d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan IV tahun 2025	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV tahun 2025 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	100 %	100 %	87,30 %	100 %	100 %	100 %	108,8 %	108,8%
1	4	3	203		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luasan Kumuh pada permukiman kumuh dengan luas < 10 Ha yang ditangani	6,38 Ha	6,38 Ha	0,56 Ha	0 Ha	0 %	0,56 Ha	6,94 Ha	108,8%
1	4	3	203	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Perem ajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremaj aan Permukiman Kumuh	5 Laporan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	6 Laporan	120%
1	4	3	203	7	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	- Dokumen	- %	1 Laporan	3 Dokumen	60%
1	4	3	203	13	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	6,38 Ha	6,38 Ha	0,56 Ha	0 Ha	0 %	0,56 Ha	6,94 Ha	108,8%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Kondisi Akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
									Target Renja Tahun 2025	Realisasi s/d Triwulan I 2025	Tingkat Capaian (%) s/d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan IV tahun 2025	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV tahun 2025 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
1	4	4			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase kawasan permukiman di luar kawasan kumuh di bawah 10 ha yang ditangani	39 %	92,63 %	36 %	33,59 %	93,30 %	36 %	100 %	256,4%
1	4	4	201		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah permukiman di luar kawasan kumuh di bawah 10 ha yang ditangani	100 Kawasan	60 Kawasan	20 Kawasan	20 Kawasan	100 %	20 Kawasan	80 Kawasan	80%
1	4	4	201	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	2411 Unit Rumah	2265 Unit Rumah	229 Unit Rumah	8 Unit Rumah	3,49 %	229 Unit Rumah	2494 Unit Rumah	103,44%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Kondisi Akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
									Target Renja Tahun 2025	Realisasi s/d Triwulan I 2025	Tingkat Capaian (%) s/d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan IV tahun 2025	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV tahun 2025 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
1	4	4	201	7	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	- Laporan	1 Laporan	1 Laporan	- Laporan	- %	1 Laporan	2 Laporan	DIV%
1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Rumah yang mendapatkan pelayanan PSU Layak	100 %	280 %	100 %	- %	- %	100 %	380 %	380%
1	4	5	201		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lingkungan perumahan yang tersedia PSU dengan baik	50 Lokasi	22 Lokasi	10 Lokasi	- Lokasi	- %	10 Lokasi	32 Lokasi	64%
1	4	5	201	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana,dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	50 Lokasi	22 Lokasi	10 Lokasi	- Lokasi	- %	10 Lokasi	32 Lokasi	64%

Analisis DINPERKIM 2025

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Daerah

Sesuai dokumen renstra *Tahun 2021 – 2026*, DINPERKIM memiliki 2 program unggulan Bupati, yaitu:

1. Bantuan Rehabilitasi RTLH
2. Rumah Korban Bencana

Pada tahun 2025, DINPERKIM melaksanakan 2 kegiatan dari program unggulan bupati, yaitu Bantuan Rehabilitas RLTH, dan Rumah Korban Bencana. Kegiatan Bantuan Rehabilitasi RLTH dianggarkan senilai Rp 13.825.000.000,- dengan target bantuan ditujukan kepada 515 unit rumah, sedangkan pada kegiatan Rumah Korban Bencana dianggarkan senilai Rp 1.000.000.000,- untuk 100 unit rumah.

Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Tahun 2025

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	Targe t Akhir Renst ra (2026)	2024		2025 s.d Triwulan I						2026		Perkiraan realisasi s.d 2026		Kode Subkegiatan
								Target		Realisasi anggaran		Tingkat Realisasi						
						Reali sasi Kiner ja	Reali sasi Angg aran	Kine rja (APB D)	Anggar an (APBD)	Kine rja (APB)	Anggar an (APBD)	Kin erja (%)	Ang gar an (%)	Target Kinerja (APDB)	Target Anggara n (APBD)	Realisa si Kinerja (APBD)	Realisasi Anggara n (APBD)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11/ 9)	14=(12/ 10)	15	16	17=7+1 1+15	18=8+12 +16	19
I	Bantuan rehabilitasi RTLH/rumah korban bencana				3458	2960	50.35 0.586 .000	737	20.925. 000.00 0			0	0					
a	Bantuan rehabilitasi RTLH	Jumlah Unit Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	unit rumah	5611	2411	2250	36.08 2.186 .000	515	13.825. 000.00 0	8	133.90 8.000	1,55	0,97	515	16.225.0 00.000	3280	66.132.1 86.000	1.04.04.2.01.01
b	Rumah Korban Bencana	Jumlah rumah layak huni bagi korban bencana yang direhab kembali	unit rumah	23	650	488	2.179 .400. 000	100	1.000.0 00.000	10	185.13 5.000	10,0 0	18,5 1	200	2.005.83 4.979	788	5.185.23 4.479	1.04.02.2.03.01
		Jumlah rumah layak huni bagi korban bencana yang dibangun	unit rumah	N/A	175	179	9.539 .000. 000	34	1.700.0 00.000	-	-	0	0	30	1.500.00 0.000	243	12.739.0 00.000	1.04.02.2.03.04

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	Targe t Akhir Renst ra (2026)	2024		2025 s.d Triwulan I						2026		Perkiraan realisasi s.d 2026		Kode Subkegiatan
								Target		Realisasi anggaran		Tingkat Realisasi						
						Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (APB)	Anggaran (APBD)	Kin erja (%)	Ang gar an (%)	Target Kinerja (APDB)	Target Anggaran (APBD)	Realisasi Kinerja (APBD)	Realisasi Anggaran (APBD)	
		Jml rumah khusus / rumah sementara beserta PSU yang dibangun bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	unit rumah	N/A	222	43	2.550 .000. 000	88	4.400.0 00.000	-	-	0	0	30	1.500.00 0.000	161	8.450.00 0.000	1.04.02.2.03.05

Analisis DINPERKIM 2025

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas, DINPERKIM melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- d. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

Berikut capaian kinerja DINPERKIM Kabupaten Demak Tahun 2025:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Demak

NO	Indikator	IKU	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025 Tw 1	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	10	11	12	13	14
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	√			83.25	84.00	84.75	85.50	84,86	N/A	84.75	85.50	
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	√			100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	√			79.47	79.72	79.97	80,22	78,55	78,6	79.97	80,22	
4	Persentase sasaran strategis Dinperkim yang mencapai target	√			100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	
5	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak	√			47.95%	65.21%	82.46%	41.74%	69.03%	69.03%	70%	82.46%	
6	Persentase penurunan kawasan kumuh	√			21.04%	31.27%	41.73%	17.71%	24.62%	24.62%	31.27%	41.73%	

NO	Indikator	IKU	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025 Tw 1	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	10	11	12	13	14
7	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota		√	√	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	
8	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten / kota		√	√	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	
9	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)			√	33,33%	51,85%	74,07%	14,81%	33,33%	33,33%	51,85%	74,07%	
10	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani			√	62,22%	78,52%	87,3%	36,05%	100%	100%	100%	100%	

NO	Indikator	IKU	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025 Tw 1	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	10	11	12	13	14
11	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)			√	28,07%	27,91%	27,75%	27,98%	27,41%	27,41%	28,07%	27,75%	

Analisis DINPERKIM 2025

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam proses perencanaan yang baik, sebelum melakukan perencanaan terlebih dahulu dilakukan identifikasi isu-isu strategis terkait dengan bidang perencanaannya. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi *entitas* (daerah/masyarakat) di masa datang. Hal tersebut dikarenakan isu-isu strategis dapat berpotensi menjadi permasalahan yang berarti bagi DINPERKIM dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dari hasil analisis, isu-isu penting yang dihadapi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Masih banyaknya jumlah rumah tidak layak huni dan permukiman kumuh perkotaan yang belum tertangani terutama pada daerah pesisir;
2. Belum tersedianya data valid Rumah Korban Bencana yang belum tertangani dan data Rumah dilokasi Rawan Bencana;
3. Masih ada Rumah Korban Bencana alam yang belum ditangani beserta kebutuhan prasarananya;
4. Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni sesuai dengan jumlah DTKS dan P3KE;
5. Minimnya basis data PSU Perumahan;
6. Belum maksimalnya fungsi PSU terutama pada Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP);
7. Belum maksimalnya intervensi kegiatan fisik dari alokasi anggaran dari APBN (DAK dan kementerian PUPR), Benkeu (Provinsi), dan Swasta dalam pencapaian keberhasilan program Penurunan Kumuh, sesuai dengan SK Kumuh Nomor: 475.26/120 Tahun 2021 yakni seluas 211,602 Ha, luasan kumuh <10 Ha seluas 6,380 Ha kewenangan pemerintah kabupaten, luasan kumuh 10-15 Ha seluas 62,333 Ha kewenangan pemerintah provinsi dan luasan kumuh >15 Ha seluas 142,889 Ha kewenangan pemerintah pusat.

2.5. Review terhadap Renja 2025

Penyusunan Perubahan Renja 2025 di DINPERKIM didasarkan pada beberapa kondisi dan kebutuhan OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Jika dibandingkan antara Renja 2025 DINPERKIM Tahun 2025 dan analisa kebutuhan, terjadi beberapa penyesuaian baik target anggaran maupun target kinerja yang harus dilakukan. Terdapat pula kinerja yang belum tercapai sehingga diperlukan kebijakan dalam penganggaran perubahan.

Berdasarkan kondisi tersebut, beberapa penyesuaian yang harus dilakukan terkait rekening gaji, penambahan sub kegiatan, pengurangan subkegiatan, dan perubahan nilai anggaran, serta pergeseran anggaran yang telah disesuaikan.

Berdasarkan kondisi tersebut, beberapa penyesuaian yang harus dilakukan terkait rekening gaji, penambahan sub kegiatan pada :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Demak :

- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

2. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh :

- Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru

Pengurangan subkegiatan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Demak :

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2. Program Kawasan Permukiman :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman

Pada Triwulan ke - 1, capaian kinerja DINPERKIM pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencapai 62,5% pada Administrasi Umum Perangkat Daerah, belum terlaksananya beberapa urusan penunjang dalam hal penunjang urusan pemerintah menjadi alasan belum tercapainya target. Pada Program Pengembangan Perumahan mencapai 5% pada rehabilitasi rumah bagi korban bencana, hal ini terjadi karena belum optimalnya pelaksanaan identifikasi korban bencana yang berhak untuk mendapat pelayanan. Program Kawasan

Permukiman telah mencapai 100% pada penanganan wilayah kumuh dibawah 10 Ha, capaian ini terwujud sejak Tahun 2024 sebesar 6,38 Ha , sehingga pada Tahun 2025 tidak ada lagi kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani DINPERKIM. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki capaian sebesar 33,59%, belum optimalnya dalam sinkronisasi data penerima pelayanan menjadi salah satu faktor penghambat. Pada Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilias Umum (PSU) belum memiliki capaian atau 0%, hal ini disebabkan karena penyesuaian perencanaan dengan perubahan standar perbelanjaan di lingkungan Kabupaten Demak.

Setelah masuk ke Triwulan ke – 2, terjadi perubahan dan penambahan dalam usulan dari para pemangku kepentingan, sehingga perlu penyesuaian lagi pada jumlah anggaran pada Renja 2025 Perubahan. Pada Urusan Pemerintah Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar memiliki pagu awal sebesar Rp 9.103.909.900,00 dan pada pagu perubahan memiliki pagu sebesar Rp 8.961.826.409,00,-, sehingga pagu berkurang sebesar Rp 142.083.491,-. Pada Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki pagu awal sebesar Rp 57.090.000.000,- dan pada pagu perubahan memiliki pagu Rp 71.686.750.000,-, sehingga pagu bertambah sebesar Rp 14.596.750.000,-. Secara terinci, tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Review terhadap Renja tahun 2025
Kabupaten Demak

Perangkat Daerah: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Ranja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					66.193.909.900					80.648.576.409	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		<i>Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi rumah tangga korban bencana/relokasi program</i>		4,860,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		<i>Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi rumah tangga korban bencana/relokasi program</i>	100	4.258.960.000	
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Demak	<i>Data Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana atau terdampak relokasi program pemerintah kabupaten</i>	10	150,000,000	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Demak	<i>Data Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana atau terdampak relokasi program pemerintah kabupaten</i>	10	117.850.000	
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Kab. Demak	<i>Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani</i>	3	50,000,000	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Kab. Demak	<i>Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani</i>	1	37.650.000	Updating database Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana



	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Kab. Demak	<i>Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/ Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah</i>	4	50,000,000	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Kab. Demak	<i>Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/ Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah</i>	1	45.000.000	
	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota		<i>Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota</i>	3	50,000,000	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota		<i>Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota</i>	1	35.200.000	
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota		<i>Cakupan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana / Relokasi Program</i>	100	460,000,000	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota		<i>Cakupan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana / Relokasi Program</i>	100	253.660.000	
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	Kab. Demak	<i>Jumlah Orang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota</i>	300	193,267,000	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	Kab. Demak	<i>Jumlah Orang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota</i>	300	133.389.000	
	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator		<i>Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih</i>	5	266,733,000	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator		<i>Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih</i>	6	120.271.000	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota		<i>Jml rumah layak huni bagi korban bencana yang dibangun dan direhab</i>	140	4,000,000,000	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota		<i>Jml rumah layak huni bagi korban bencana yang dibangun dan direhab</i>	310	3.600.000.000	



	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Demak	<i>Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi</i>	100	2,000,000,000	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Demak	<i>Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi</i>	200	1.000.000.000	Jumlah pendataan rumah rusak ringan
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Demak	<i>Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun</i>	30	1,500,000,000	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Demak	<i>Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun</i>	30	2.000.000.000	
						Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota		<i>Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan</i>		600.000.000	
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Demak	<i>Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	10	500,000,000	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Demak	<i>Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>			
						Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		<i>Jumlah Pembinaan Rusun/ Rumah Khusus</i>			Belum terlaksanakannya Pembangunan Rusun
						Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Kab. Demak	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun</i>			
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		<i>Presentase Rekomendasi izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang dikeluarkan</i>	100	250,000,000	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		<i>Presentase Rekomendasi izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang dikeluarkan</i>	100	287.450.000	



	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Demak	<i>Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/ Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik</i>	1	250,000,000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Demak	<i>Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/ Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik</i>	1	287.450.000	
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		<i>Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani</i>	87,3	1,785,000,000	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		<i>Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani</i>	87,30	1.703.180.000	
						Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		<i>Persentase Rekomendasi izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan</i>			Kegiatan diakomodir oleh Dinas PU Taru dan DinPTSP
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Kab. Demak	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman</i>			
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		<i>Luasan Kumuh pada permukiman kumuh dengan luas < 10 Ha yang ditangani</i>	0,56	1,785,000,000	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		<i>Luasan Kumuh pada permukiman kumuh dengan luas < 10 Ha yang ditangani</i>	0,56	1.703.180.000	
						Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Demak	<i>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki</i>			



	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Perumahan Permukiman Kumuh	Kab. Demak	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Perumahan Permukiman Kumuh</i>	1	235,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Perumahan Permukiman Kumuh	Kab. Demak	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Perumahan Permukiman Kumuh</i>	1	153.180.000	
	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Demak	<i>Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi</i>	1	100,000,000	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Demak	<i>Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi</i>	1	100.000.000	
	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Demak	<i>Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar</i>	1	1,450,000,000	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Demak	<i>Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar</i>	0,56	1.450.000.000,	Penyesuaian terhadap target penanganan luasan kumuh
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		<i>Persentase kawasan permukiman di luar kawasan kumuh di bawah 10 ha yang ditangani</i>	36	3.820.000.000	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		<i>Persentase kawasan permukiman di luar kawasan kumuh di bawah 10 ha yang ditangani</i>	36	3.634.610.000	
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		<i>Jumlah permukiman di luar kawasan kumuh di bawah 10 ha yang ditangani</i>	20	3.820.000.000	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		<i>Jumlah permukiman di luar kawasan kumuh di bawah 10 ha yang ditangani</i>	20	3.634.610.000	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Demak	<i>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki</i>	220	3,570,000,000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Demak	<i>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki</i>	229	3.552.920.000	



	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Kab. Demak	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru</i>	1	115,000,000	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Kab. Demak	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru</i>	1	81.690.000	
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		<i>Persentase Rumah yang mendapatkan pelayanan PSU Layak</i>	100	46.625.000.000	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		<i>Persentase Rumah yang mendapatkan pelayanan PSU Layak</i>	100	62.090.000.000	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		<i>Jumlah Lingkungan perumahan yang tersedia PSU dengan baik</i>	14	46.625.000.000	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		<i>Jumlah Lingkungan perumahan yang tersedia PSU dengan baik</i>	10	62.090.000.000	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Demak	<i>Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian</i>	14	46.625.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Demak	<i>Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian</i>	10	62.090.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Presentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti presentase pelayanan sesuai standar pelayanan</i>	100	9.103.909.900	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Presentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti presentase pelayanan sesuai standar pelayanan</i>	100	8.961.826.409	



	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah</i>	10	111,680,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah</i>	10	91.680.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Demak	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	3	24,800,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Demak	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	3	24.800.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Demak	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	4	43,680,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Demak	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	4	23.680.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Demak	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	3	43,200,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Demak	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	3	43.200.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Jumlah laporan keuangan</i>	1	6.718.909.900	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Jumlah laporan keuangan</i>	1	6.718.909.900	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Demak	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	58	5.105.795.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Demak	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	31	5.105.795.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Demak	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	1	1,613,114,900	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Demak	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	1	1.613.114.900	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		<i>Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi</i>	2	20,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		<i>Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi</i>	2	20.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Demak	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	2	20,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Demak	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	2	20.000.000	



	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	425,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	313.376.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Demak	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	325,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Demak	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	76	213.376.000	Penyesuaian jumlah SDM DINPERKIM
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80	100,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5	100.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	892,525,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	782.537.500	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Demak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	15,454,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Demak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	15.454.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Demak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	186,430,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Demak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	186.430.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Demak	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	80,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Demak	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	80.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Demak	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	133,939,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Demak	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	133.939.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	17,500,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10	17.500.000	



	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Demak	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1	330,100,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Demak	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1	244.172.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Demak	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	6	21,951,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Demak	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	6	21.951.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Demak	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	2	107,151,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Demak	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	2	82.557.500	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		<i>Jumlah BMD yang diadakan</i>	83	480,795,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		<i>Jumlah BMD yang diadakan</i>	8	681.941.000	
	Pengadaan Mebel	Kab. Demak	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	51	42,595,000	Pengadaan Mebel	Kab. Demak	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	3	42.595.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Demak	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	32	438,200,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Demak	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	5	639.346.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Jasa Penunjang Urusan yang tersedia</i>	100	35,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Jasa Penunjang Urusan yang tersedia</i>	100	35.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Demak	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1500	15,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Demak	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	2060	15.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Demak	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12	20,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Demak	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12	20.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Jumlah BMD yang terpelihara</i>	100	420,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Jumlah BMD yang terpelihara</i>	100	420.000.000	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Demak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21	250,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Demak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21	250.000.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Demak	Jumlah Mebel yang Dipelihara	194	20,000,000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Demak	Jumlah Mebel yang Dipelihara	194	20.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150	150,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150.	150.000.000	

Analisis DINPERKIM 2025

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Selain berpedoman pada Renstra, DINPERKIM Demak juga memperhatikan usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan. Telaah terhadap usulan masyarakat dilakukan secara bertahap, mulai dari penilaian teknis, kelayakan dan skala prioritas, serta kesesuaian kewenangan.

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan DINPERKIM.

Langkah yang telah dilakukan dalam mengkaji usulan program dan kegiatan dari musrenbang kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Membuat desk batasan usulan program/kegiatan yang dapat diusulkan oleh masyarakat;
2. Menginventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat;
3. Menyesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku;
4. Meneliti kelengkapan informasi dari usulan, bila belum lengkap terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan;
5. Bila belum lengkap melakukan konfirmasi (kalau memungkinkan), atau memberi catatan untuk dikonfirmasi dengan hasil analisis kebutuhan;
6. Memeriksa apakah usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan DINPERKIM; dan
7. Membuat rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DINPERKIM.

Adapun hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu 16 usulan musrenbang kecamatan dan 193 usulan reses, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Demak Tahun 2025

Perangkat Daerah: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Pekerjaan/ Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-7
1	Pembangunan talud jalan Trengguli RT 08 RW 10, Kab. Demak	Trengguli RT 08 RW 10, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	240 m3	Musrenbang (Verifikasi OPD)
2	Betonisasi jalan antar desa rt 04 rw 03 Desa Mojodemak, Kab. Demak	rt 04 rw 03 Desa Mojodemak, Kab. Demak	Panjang drainase terbangun	140 m	Musrenbang (Verifikasi OPD)
3	Pembangunan Talud mrisen rt 06 rw 01 batas desa mrisen-dari kunci, Kab. Demak	mrisen rt 06 rw 01 batas desa mrisen-dari kunci, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	240 m3	Musrenbang (Verifikasi OPD)
4	Betonisasi jalan Dk. Rejosari-Dk. Kradenan Ds. Botorejo	Dk. Rejosari-Dk. Kradenan Ds. Botorejo	Panjang jalan terbangun	140 m	Musrenbang (Verifikasi OPD)
5	Rehabilitasi jembatan penghubung Rw 04 - Rw 05, Desa Getas, Kec. Wonosalam, Kab. Demak	Rw 04 - Rw 05, Desa Getas, Kec. Wonosalam, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	1 Unit	Musrenbang (Verifikasi OPD)
6	Betonisasi RT 01 RW 04 Desa Kunci Kec. Dempet	RT 01 RW 04 Desa Kunci Kec. Dempet	Panjang drainase terbangun	200 m3	Musrenbang (Verifikasi OPD)
7	Betonisasi jalan RT 01 RW 04 Desa Jogoloyo, Kec. Wonosalam Kab. Demak	RT 01 RW 04 Desa Jogoloyo, Kec. Wonosalam Kab. Demak	Panjang drainase terbangun	140 m	Musrenbang (Verifikasi OPD)
8	Betonisasi jalan Dk. Drono Pilangsari - Dk Demung Desa Pilangrejo, Kec. Wonosalam, Kab. Demak	Dk. Drono Pilangsari - Dk Demung Desa Pilangrejo, Kec. Wonosalam, Kab. Demak	Panjang drainase terbangun	140 m	Musrenbang (Verifikasi OPD)
9	Betonisasi Jalan Rw.01 Desa Bedono Kec Sayung, Kab. Demak	Rw.01 Desa Bedono Kec Sayung, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun		Musrenbang (Verifikasi OPD)
10	Peningkatan Jalan Masuk Desa Loireng Kab. Demak	Desa Loireng Kab. Demak	Panjang jalan terbangun		Musrenbang (Verifikasi OPD)
11	Peningkatan Jalan RW 07 Desa Sayung Kec Sayung, Kab. Demak	RW 07 Desa Sayung Kec Sayung, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun		Musrenbang (Verifikasi OPD)
12	PEMBANGUNAN DRAINASE RT.001 RW.003 JETAKSARI RT.001 RW.003, Kab. Demak	RT.001 RW.003 JETAKSARI RT.001 RW.003, Kab. Demak	Panjang drainase terbangun		Musrenbang (Verifikasi OPD)
13	Normalisasi Drainase/gorong-gorong RW 06, Kel. Bintoro Kec. Demak Kab. Demak	RW 06, Kel. Bintoro Kec. Demak Kab. Demak	Panjang drainase terbangun	P=25 M x L=3 M, Kedalaman 10 M	Musrenbang (Verifikasi OPD)
14	Pembangunan saluran/drainase Dk. sumur Rt 01, Rt 02 Rw 06 Kelurahan Kadilangu, Kab. Demak	Dk. sumur Rt 01, Rt 02 Rw 06 Kelurahan Kadilangu, Kab. Demak	Panjang drainase terbangun	40 m3	Musrenbang (Verifikasi OPD)
15	Betonisasi jalan Rw 01 Kelurahan Betokan, Kab. Demak	Rw 01 Kelurahan Betokan, Kab. Demak	Penjang jalan terbangun	140 m	Musrenbang (Verifikasi OPD)
16	Pembangunan Saluran Gorong yang terletak di RT 02 dan RT 06 RW 02 Kel. Mangujiwan	RT 02 dan RT 06 RW 02 Kel. Mangujiwan	Panjang drainase terbangun	40 m3	Musrenbang (Verifikasi OPD)

No	Pekerjaan/ Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-7
17	Betonisasi jalan RW 04 kel. Kalicilik, Kab. Demak	RW 04 kel. Kalicilik, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	100m x 4m x 0,20m	Musrenbang (Verifikasi OPD)
18	Peningkatan Saluran/Drainase Gg. Kenanga I Kel. Singorejo RT 03 RW 02, Kab. Demak	Gg. Kenanga I Kel. Singorejo RT 03 RW 02, Kab. Demak	Panjang drainase terbangun	75 M	Musrenbang (Verifikasi OPD)
19	Peningkatan Jalan Beton RT 03 RW 01, Desa Bango Kec. Demak Kab. Demak	RT 03 RW 01, Desa Bango Kec. Demak Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	140 m	Musrenbang (Verifikasi OPD)
20	Betonisasi jalan RW 01, Desa Sedo Kec. Demak Kab. Demak	RW 01, Desa Sedo Kec. Demak Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	100 m	Musrenbang (Verifikasi OPD)
21	Betonisasi rt 05 rw 01 desa raji kec. demak kab. demak	rt 05 rw 01 desa raji kec. demak kab. demak	Panjang jalan terbangun	140x4x0,20 M	Musrenbang (Verifikasi OPD)
22	Pembangunan Betonisasi jalan Blok barat lapangan Cangkring RT 05 RW 02 desa Mulyorejo kec. demak kab. demak	Cangkring RT 05 RW 02 desa Mulyorejo kec. demak kab. demak	Panjang jalan terbangun	140 m	Musrenbang (Verifikasi OPD)
23	Betonisasi jalan RT 01 RW 05 desa kalikondang kec. demak kab. demak	RT 01 RW 05 desa kalikondang kec. demak kab. demak	Panjang jalan terbangun	140 m	Musrenbang (Verifikasi OPD)
24	Betonisasi Jl Saribaru Mahasari RW 01 dan RW 02 Desa Katonsari kec. demak kab. demak	Jl Saribaru Mahasari RW 01 dan RW 02 Desa Katonsari kec. demak kab. demak	Panjang jalan terbangun	140 m'	Musrenbang (Verifikasi OPD)
25	Pembangunan Talud dan Betonisasi Dusun Melikan Desa Weding Kec. Bonang	Dusun Melikan Desa Weding Kec. Bonang	Panjang jalan terbangun	Jalan=200M X 3M X 0,15M Talud=200M X 0.80MX 0.10M	Musrenbang (Verifikasi OPD)
26	Betonisasi Jalan Desa Serangan	Desa Serangan	Panjang jalan terbangun	140 M	Musrenbang (Verifikasi OPD)
27	Jalan, Desa Jali Kec. Bonang	Desa Jali-Tempuran, Desa Jali Kec. Bonang	Panjang jalan terbangun	140 M	Musrenbang (Verifikasi OPD)
28	Pembangunan Jalan Utama Desa Sumberejo	Desa Sumberejo	Panjang jalan terbangun	140 M	Musrenbang (Verifikasi OPD)
29	Betonisasi Jalan Dukuh Ngasinan - Dukuh Kembangan, Desa Kembangan, Kab. Demak	Dukuh Ngasinan - Dukuh Kembangan, Desa Kembangan, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	140 M	Musrenbang (Verifikasi OPD)
30	Betonisasi Jalan Dukuh Pojok RW 1 Desa Harjowinangun, Kecamatan Dempet, kabupaten Demak, Kab. Demak	Dukuh Pojok RW 1 Desa Harjowinangun, Kecamatan Dempet, kabupaten Demak, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	140 M	Musrenbang (Verifikasi OPD)
31	PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG DESA JERUKGULUNG DENGAN DESA KUNIR, DUSUN MAGUAN RT 006 RW 002 DESA JERUKGULUNG KEC. DEMPET KAB. DEMAK	DESA JERUKGULUNG DENGAN DESA KUNIR, DUSUN MAGUAN RT 006 RW 002 DESA JERUKGULUNG KEC. DEMPET KAB. DEMAK	Jembatan terbangun		Musrenbang (Verifikasi OPD)
32	Betonisasi Jalan di Perempatan Dk. Galeh RT.06 RW.01 menuju arah jalan Sidomulyo, Desa Gempoldenok Kec. Dempet Kab. Demak	Dk. Galeh RT.06 RW.01 menuju arah jalan Sidomulyo, Desa Gempoldenok Kec. Dempet Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	200 x 4 x 0.15 m	Musrenbang (Verifikasi OPD)

No	Pekerjaan/ Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-7
33	Betonisasi jalan Dukuh Peluk ke Bandung Kidul Desa Kunir Kec. Dempet	Dukuh Peluk ke Bandung Kidul Desa Kunir Kec. Dempet	Panjang jalan terbangun	140 m'	Musrenbang (Verifikasi OPD)
34	Peningkatan jalan (rabat beton) desa bakalrejo-Desa Temuroso dukuh Bakalan Desa Bakalrejo, Kab. Demak	desa bakalrejo-Desa Temuroso dukuh Bakalan Desa Bakalrejo, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun		Musrenbang (Verifikasi OPD)
35	Betonisasi jalan tembus Bogosari Desa Sukorejo , Kec. Guntur Kab. Demak	Desa Sukorejo, Kec. Guntur Kab. Demak	Panjang jalan terbangun		Musrenbang (Verifikasi OPD)
36	Pembangunan Jembatan penghubung Desa Banjarejo - Desa Wonorejo Dukuh Gabus Desa Banjarejo, Kec. Guntur Kab. Demak	Desa Banjarejo - Desa Wonorejo Dukuh Gabus Desa Banjarejo, Kec. Guntur Kab. Demak	Jembatan terbangun		Musrenbang (Verifikasi OPD)
37	Betonisasi jalan tangkis - Pilangsari Sayung Desa Tangkis Kec. Guntur, Kab. Demak	Desa Tangkis Kec. Guntur, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun		Musrenbang (Verifikasi OPD)
38	Pembangunan talud jalan poros Desa Tlogoweru - Desa Pundenarum Desa Tlogoweru Kec. Guntur, Kab. Demak	Desa Tlogoweru - Desa Pundenarum Desa Tlogoweru Kec. Guntur, Kab. Demak	Panjang talud terbangun		Musrenbang (Verifikasi OPD)
39	Betonisasi jalan penghubung Desa Bogosari - Desa Temuroso RT 10 RW 02, Desa Bogosari, Kec. Guntur Kab. Demak	Desa Bogosari - Desa Temuroso RT 10 RW 02, Desa Bogosari, Kec. Guntur Kab. Demak	Panjang jalan terbangun		Musrenbang (Verifikasi OPD)
40	Pembangunan saluran drainase jalan raya utama Desa Krandon - Tangkis, Desa Krandon, Kab. Demak	Desa Krandon - Tangkis, Desa Krandon, Kab. Demak	Panjang drainase terbangun		Musrenbang (Verifikasi OPD)
41	Pembangunan Talud Desa Temuroso - Sukorejo Dukuh Njasun Desa Temuroso, Kec. Guntur, Kab. Demak	Desa Temuroso - Sukorejo Dukuh Njasun Desa Temuroso, Kec. Guntur, Kab. Demak	Panjang talud terbangun		Musrenbang (Verifikasi OPD)
42	Pembangunan betonisasi sabuk Desa Guntur RT 09 RW 02, Kec. Guntur Kab. Demak	Desa Guntur RT 09 RW 02, Kec. Guntur Kab. Demak	Panjang jalan terbangun		Musrenbang (Verifikasi OPD)
43	Pembangunan talud jalan sepanjang AMD Bumiharjo-Bakalrejo, Kec. Guntur, Kab. Demak'	Bumiharjo-Bakalrejo, Kec. Guntur, Kab. Demak'	Panjang talud terbangun		Musrenbang (Verifikasi OPD)
44	Pembangunan Talud jalan Dukuh Totol RW 6 Desa Tlogorejo, Kec. Guntur Kab. Demak	Dukuh Totol RW 6 Desa Tlogorejo, Kec. Guntur Kab. Demak	Panjang talud terbangun		Musrenbang (Verifikasi OPD)
45	Betonisasi jalan poros Desa Trimulyo, Kab. Demak	Desa Trimulyo, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun		Musrenbang (Verifikasi OPD)
46	Betonisasi jalan alternatif dan penghubung antar Desa Tlogorejo-Karangawen, Kab. Demak	Desa Tlogorejo-Karangawen, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun		Musrenbang (Verifikasi OPD)
47	Talud Jalan Dukuh Karangpacing Desa Rejosari Karangawen Demak, Kab. Demak	Dukuh Karangpacing Desa Rejosari Karangawen Demak, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun		Musrenbang (Verifikasi OPD)
48	Betonisasi jalan Dukuh Bodi Desa Bumirejo Kec. Karangawen	Dukuh Bodi Desa Bumirejo Kec. Karangawen	Panjang jalan terbangun		Musrenbang (Verifikasi OPD)

No	Pekerjaan/ Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-7
49	Betonisasi jalan penghubung dusun karangawen dan dusun waruk (jalan Teroh), Desa Karangawen	dusun karangawen dan dusun waruk (jalan Teroh), Desa Karangawen	Panjang jalan terbangun		Musrenbang (Verifikasi OPD)
50	Betonisasi Jalan Dukuh Mbalong Desa Margohayu	Dukuh Mbalong Desa Margohayu	Panjang jalan terbangun		Musrenbang (Verifikasi OPD)
51	Betonisasi jalan RW. 05, Desa Batu Kec. Karangtengah Kab. Demak	RW. 05, Desa Batu Kec. Karangtengah Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	140 m	Musrenbang (Verifikasi OPD)
52	Betonisasi jalan Dukun Perbalan Desa Dukun RW 3 Kec. Karangtengah Kab. Demak, Kab. Demak	Desa Dukun RW 3 Kec. Karangtengah Kab. Demak, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	140 m	Musrenbang (Verifikasi OPD)
53	Betonisasi Jalan penghubung Desa Grogol rw02 dengan rw03 , Kec. Karangtengah, Kab. Demak	Desa Grogol rw02 dengan rw03 , Kec. Karangtengah, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	140 m	Musrenbang (Verifikasi OPD)
54	Betonisasi Jalan Desa Kedunguter RW 01 Kecamatan Karangtengah	Desa Kedunguter RW 01 Kecamatan Karangtengah	Panjang jalan terbangun	140 m	Musrenbang (Verifikasi OPD)
55	Pembangunan Talud Desa Pulosari RT 02 RW 01 Kecamatan Karangtengah	Desa Pulosari RT 02 RW 01 Kecamatan Karangtengah	Panjang talud terbangun	100 m	Musrenbang (Verifikasi OPD)
56	Betonisasi Jalan Rejosari - Desa Karangtowo	Rejosari - Desa Karangtowo	Panjang jalan terbangun	140 m	Musrenbang (Verifikasi OPD)
57	Pembangunan Jalan RW.01 s/d RW.05 Desa Sampang Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak	RW.01 s/d RW.05 Desa Sampang Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak	Panjang jalan terbangun	140 m	Musrenbang (Verifikasi OPD)
58	Betonisasi jalan Desa Tambak bulusan RT 04 RW 02 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, Kab. Demak	Desa Tambak bulusan RT 04 RW 02 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	140 m	Musrenbang (Verifikasi OPD)
59	Betonisasi Jalan Ds. Mijen Rt 01 Rw 01 - Rt 04 Rw 03 Mijen Demak, Kab. Demak	Ds. Mijen Rt 01 Rw 01 - Rt 04 Rw 03 Mijen Demak, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	149 M	Musrenbang (Verifikasi OPD)
60	Saluran Got DESA BAKUNG, Kab. Demak	DESA BAKUNG, Kab. Demak	Panjang drainase terbangun	200 m	Musrenbang (Verifikasi OPD)
61	Rehabilitasi Jalan Desa jalan Bantengmati/ Geneng, Kab. Demak	Bantengmati/ Geneng, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	140 M	Musrenbang (Verifikasi OPD)
62	Pembangunan Jembatan Utama Desa yang berada di area keluar masuk desa Tanggul, Kab. Demak	desa Tanggul, Kab. Demak	Jembatan terbangun		Musrenbang (Verifikasi OPD)
63	Pembangunan Betonisasi Jalan Perbatasan Desa Mandung dan Desa Buko, Desa Mandung RT 03 RW 02, Kab. DemakKecamatan Wedung	Desa Mandung RT 03 RW 02, Kab. DemakKecamatan Wedung	Panjang jalan terbangun		Musrenbang (Verifikasi OPD)
64	Peningkatan Jalan Antar Desa Berahan Wetan-Desa Berahan Kulon Kec. Wedung Kab. Demak	Desa Berahan Wetan-Desa Berahan Kulon Kec. Wedung Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	140 m	Musrenbang (Verifikasi OPD)
65	Pembangunan Jembatan Rt.03 Rw.04 Desa Gedangalas, Kec. Gajah, Kab. Demak	Rt.03 Rw.04 Desa Gedangalas, Kec. Gajah, Kab. Demak	Jembatan terbangun	1 Unit	Musrenbang (Verifikasi OPD)
66	Betonisasi Jalan Penghubung Desa Tlogopandogan- Jatisono Desa Tlogopandogan RT 1	Desa Tlogopandogan- Jatisono Desa Tlogopandogan RT 1	Panjang jalan terbangun	140 m	Musrenbang (Verifikasi OPD)

No	Pekerjaan/ Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-7
	RW 3, Kec. Gajah Kab. Demak	RW 3, Kec. Gajah Kab. Demak			
67	Pembangunan beton Jalan Inspeksi RT 07 RW 03, Desa Gajah Kec. Gajah Kab. Demak	RT 07 RW 03, Desa Gajah Kec. Gajah Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	140 m	Musrenbang (Verifikasi OPD)
68	Pembangunan Jembatan Desa Boyolali Kec. Gajah, Kab. Demak	Desa Boyolali Kec. Gajah, Kab. Demak	Jembatan terbangun	1 Unit	Musrenbang (Verifikasi OPD)
69	Betonisasi jalan utama desa kalitengah ke desa kembangarum, Desa Kalitengah, Kec. Mranggen Kab. Demak	Desa Kalitengah, Kec. Mranggen Kab. Demak	Panjang jalan terbangun		Musrenbang (Verifikasi OPD)
70	Betonisasi jalan Jl. Menur Jamus Rt 04 Rw 01 Desa Menur, Kab. Demak, Kab. Demak	Jl. Menur Jamus Rt 04 Rw 01 Desa Menur, Kab. Demak, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	140 m	Musrenbang (Verifikasi OPD)
71	Pembangunan saluran air dan sebagai pembatas jalan Desa Ngemplak RT.08 RW.01, Kab. Demak	Desa Ngemplak RT.08 RW.01, Kab. Demak	Panjang drainase terbangun		Musrenbang (Verifikasi OPD)
72	Betonisasi jalan Dukuh Meteseh Rt 01 Rw 01 Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung, Kab. Demak	Dukuh Meteseh Rt 01 Rw 01 Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	140 m	Musrenbang (Verifikasi OPD)
73	Pembangunan saluran drainase RW 1 dan RW 2 Desa Sokokidul, Kec. Kebonagung Kab. Demak	RW 1 dan RW 2 Desa Sokokidul, Kec. Kebonagung Kab. Demak	Panjang drainase terbangun	U Dith L : 0,5 M T: 0,5 M P : 1,2 M X 500 M	Musrenbang (Verifikasi OPD)
74	Betonisasi jalan penghubung Babat - Werdoyo Desa Babat, Kec. Kebonagung, Kab. Demak	penghubung Babat - Werdoyo Desa Babat, Kec. Kebonagung, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	140 m	Musrenbang (Verifikasi OPD)
75	Pembangunan talud drainase dusun galan 1 rt 1 dan rt. 2 rw. 4 desa mangunrejo , Kec. Kebonagung Kab. Demak	dusun galan 1 rt 1 dan rt. 2 rw. 4 desa mangunrejo , Kec. Kebonagung Kab. Demak	Panjang talud terbangun	100 m3	Musrenbang (Verifikasi OPD)
76	Pembangunan Talud Drainase Rt 06,09 Rw 02 Dukuh Srekan Kidul Desa Megonten Kec. Kebonagung Kab. Demak	Rt 06,09 Rw 02 Dukuh Srekan Kidul Desa Megonten Kec. Kebonagung Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	P = 200 m, L = 30 cm T = 70 m	Musrenbang (Verifikasi OPD)
77	Pembangunan Pavingisasi Di Lingkungan Yayasan Miftahul Falah Desa Betahwalang Kecamatan Bonang	Desa Betahwalang, Kecamatan Bonang, Kab. Demak	Luas paving terpasang	1075 m ²	Pokir
78	Peningkatan jalan desa margolinduk kec. bonang	Desa Margolinduk Kec. Bonang, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	100 m	Pokir
79	Pembangunan Talud RW 03 Desa Morodemak Kecamatan Bonang	Desa Morodemak, Kecamatan Bonang, Kab. Demak	Panjang talud terbangun	270 m	Pokir
80	Peningkatan jalan rw 5 desa morodemak kec. bonang	Desa Morodemak, Kec. Bonang, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	100 m	Pokir
81	Peningkatan jalan Dukuh Gandong Menuju Dukuh Tambakpolo Desa Purworejo Kec. bonang	Desa Purworejo, Kec. Bonang, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	100 m	Pokir
82	Peningkatan jalan dukuh tambak malang desa purworejo Kec. Bonang	Desa Purworejo, Kec. Bonang, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	100 m	Pokir
83	Peningkatan Jalan Desa Karangrejo Kecamatan Bonang	Desa Karangrejo Kecamatan Bonang, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	100 m	Pokir
84	Peningkatan Jalan Desa Sumberejo Kecamatan Bonang	Desa Sumberejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak	Panjang jalan terbangun	100 m	Pokir

No	Pekerjaan/ Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-7
85	Peningkatan Jalan Desa Gebangarum Kecamatan Bonang	Desa Gebangarum, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak	Panjang jalan terbangun	100 m	Pokir
86	Peningkatan Jalan Desa Gebang Kecamatan Bonang	Desa Gebang, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak	Panjang jalan terbangun	100 m	Pokir
87	Penataan Lingkungan Talud Dan Urugan Desa Gebangarum Kecamatan Bonang	Desa Gebangarum, Kecamatan Bonang, Kab. Demak	Volume talud terbangun	270 m ³	Pokir
88	Rehabilitasi drainase RW 2 Desa Betahwalang Kec Bonang	Desa Betahwalang, Kec Bonang, Kab. Demak	Panjang drainase terbangun	90 m	Pokir
89	Betonisasi Jalan Kelurahan Kalicilik RW 04 Kecamatan Demak	Kelurahan Kalicilik, Kecamatan Demak, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	100 m	Pokir
90	Peningkatan Jalan Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang	Desa Bonangrejo, Kecamatan Bonang, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	70 m	Pokir
91	Pembangunan talud Dukuh Karangawang, Desa Sidorejo, Kec. Sayung	Desa Sidorejo, Kec. Sayung, Kab. Demak	Luas talud terbangun	340 m ²	Pokir
92	PENINGKATAN JALAN RW 1 KARANGASEM - SAYUNG DEMAK	Desa Karangasem, Kec. Sayung, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	190 m	Pokir
93	TALUD PENAHAN JALAN RW 2 DUKUH PENJOR DESA BULUSARI - SAYUNG - DEMAK	Desa Bulusari, Kec. Sayung, Kab. Demak	Panjang talud terbangun	270 m	Pokir
94	BETONISASI JL. RT 02 RW 02 DESA SAYUNG KEC. SAYUNG (MENUJU DUKUH BABAJAN)	Desa Sayung, Kec. Sayung, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	70 m	Pokir
95	Peningkatan Jalan Wilayah Kebongading Desa Kebonbatur Kec. Mranggen	Desa Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	100 m	Pokir
96	Betonisasi Jalan RW 10 Kebon Arum Utara Desa Kebonbatur Kec. Mranggen	Desa Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	70 m	Pokir
97	PENINGKATAN JALAN RW 14 PUCANG RINENGGO DESA BATURSARI KEC MRANGGEN	Desa Batursari, Kec Mranggen, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	70 m	Pokir
98	BETONISASI JALAN KELURAHAN MANGUNJIWAN KEC DEMAK KAB DEMAK	Kelurahan Mangunjiwan, Kec. Demak, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	50 m	Pokir
99	BETONISASI JALAN RW 04 DESA KARANGANYAR KEC KARANGANYAR	Desa Karanganyar, Kec. Karanganyar, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	70 m	Pokir
100	BETONISASI JALAN RW 03 DESA HARJOWINANGUN KEC DEMPET	Desa Harjowinangun, Kec. Dempet, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	50 m	Pokir
101	Betonisasi Jalan RW 28 Desa Kebonbatur Kec. Mranggen	Desa Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	50 m	Pokir
102	PENINGKATAN JALAN RW 02 DESA SURODADI KEC SAYUNG	Desa Surodadi, Kec. Sayung, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	100 m	Pokir
103	Betonisasi Jalan RW 05 Desa Kebonbatur Kec. Mranggen	Desa Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	50 m	Pokir
104	BETONISASI JALAN RW 02 DESA WRINGINJAJAR KEC MRANGGEN	Desa Wringinjajar, Kec. Mranggen, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	70 m	Pokir
105	Betonisasi Jalan Dukuh Ronggossari RW 03 Desa Kebonbatur Kec. Mranggen	Desa Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	50 m	Pokir
106	PEMBANGUNAN TALUD RW 02 DESA KARANGANYAR KEC KARANGANYAR	Desa Karanganyar, Kec. Karanganyar, Kab. Demak	Volume talud terbangun	200 m ³	Pokir
107	Pavingisasi Jalan Pucang Sari Timur RW 16 Pucang	Desa Batursari, Kec. Mranggen, Kab. Demak	Luas paving terpasang	300 m ²	Pokir

No	Pekerjaan/ Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-7
	Gading Desa Batusari Kec. Mranggen				
108	Pavingisasi Jalan Pucang Kerto RW 14 Pucang Gading Desa Batusari Kec. Mranggen	Desa Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak	Luas paving terpasang	300 m ³	Pokir
109	Betonisasi Jalan RW 08 Desa Batusari Kec. Mranggen	Desa Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	50 m	Pokir
110	Betonisasi Jalan Tlogo Kencono RW 38 Desa Batusari Kec. Mranggen	Desa Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	50 m	Pokir
111	Pavingisasi Jalan Pucang Karya Desa Batusari Kec. Mranggen	Desa Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak	Luas paving terpasang	300 m	Pokir
112	Pembangunan Drainase Pucang Argo Desa Batusari Kec. Mranggen	Desa Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak	Panjang drainase terbangun	90 m	Pokir
113	Pembangunan Talud (Bronjong) RW 40 Ivory Park Desa Batusari Kec. Mranggen	Desa Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak	Panjang talud terbangun	100 m	Pokir
114	Pembangunan Drainase Pucang Jajar Desa Batusari Kec. Mranggen	Desa Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak	Panjang drainase terbangun	90 m	Pokir
115	Pembangunan Talud Jalan Penghubung Desa Karangsono - Desa Kembangarum Kec. Mranggen	Desa Kembangarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak	Panjang talud terbangun	270	Pokir
116	Pembangunan Jembatan RW 02 Sumberejo Mranggen	Desa Sumberejo Kec. Mranggen, Kab. Demak	Panjang Jembatan terbangun	115 m	Pokir
117	Pembangunan Pagar Bumi Batas Polsek Gajah	Kec. Gajah, Kab. Demak	Pagar bumi terbangun	34 m ²	Pokir
118	Peningkatan Jalan Syeh Ibrahim Desa Brumbung Kec. Mranggen	Desa Brumbung, Kec. Mranggen, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	50 m	Pokir
119	Pembangunan Drainase RW 01 Desa Ngemplak Kec. Mranggen	Desa Ngemplak, Kec. Mranggen, Kab. Demak	Panjang drainase terbangun	130 m	Pokir
120	Betonisasi Jalan RW 07 Pondok Majapahit II Desa Mranggen Kec. Mranggen	Desa Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	100 m	Pokir
121	Betonisasi Jalan Jamus Godo Desa Jamus Kec. Mranggen	Desa Jamus, Kec. Mranggen, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	70 m	Pokir
122	Pembangunan Jembatan RW 05 Desa Waru Kec. Mranggen	Desa Waru, Kec. Mranggen, Kab. Demak	Panjang Jembatan terbangun	50 m	Pokir
123	Peningkatan Jalan Pondok Majapahit 1 Desa Bandungrejo Kec. Mranggen	Desa Bandungrejo, Kec. Mranggen, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	70 m	Pokir
124	Pembangunan Drainase RW 04 Pondok Majapahit 1 Desa Bandungrejo Kec. Mranggen	Desa Bandungrejo, Kec. Mranggen, Kab. Demak	Panjang drainase terbangun	130 m	Pokir
125	Pembangunan Drainase RW 04 Desa Menur Kec. Mranggen	Desa Menur, Kec. Mranggen, Kab. Demak	Panjang drainase terbangun	130 m	Pokir
126	Betonisasi Jalan Bambu Asri RW 34 Desa Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak	Desa Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	70 m	Pokir
127	Peningkatan Jalan Lingkungan RW 04 Daleman Desa Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak	Desa Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	70 m	Pokir
128	Peningkatan Jalan RW 04 Daleman Desa Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak	Desa Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	70 m	Pokir
129	Betonisasi jalan dukuh pojok Rw 1 Desa	Desa Harjowinangun,	Panjang jalan terbangun	100 m	Pokir

No	Pekerjaan/ Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-7
	Harjowinangun Kec.Dempet Kab.Demak	Kec.Dempet, Kab. Demak			
130	Pembangunan Talud jalan Dukuh Wedean Rw 2 Desa Harjowinangun Kec.Dempet Kab.Demak	Desa Harjowinangun, Kec.Dempet, Kab. Demak	Volume talud terbangun	270 m³	Pokir
131	Betonisasi jalan Rw 01 Desa Jeruk Gulung, Kec. Dempet, Kab. Demak	Desa Jeruk Gulung, Kec. Dempet, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	100 m	Pokir
132	Drainase di RW 01 dan RW 02 desa tanjunganyar, kecamatan gajah	Desa Tanjunganyar, Kecamatan Gajah, Kab. Demak	Volume drainase terbangun	180 m	Pokir
133	Pembangunan Betonisasi jalan RW 03 Desa solowire Kecamatan Kebon Agung Kab.Demak	Desa Solowire, Kecamatan Kebon Agung Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	100 m	Pokir
134	BETONISASI RW.01 DESA MIJEN KEC.KEBONAGUNG KAB.DEMAK	Desa Mijen, Kec.Kebonagung, Kab.Demak	Panjang jalan terbangun	100 m	Pokir
135	Betonisasi Jl. Penghubung Desa katonsari Desa Kalikondang Desa Donorojo, Kecamatan Demak	Desa Donorojo, Kecamatan Demak, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	100 m	Pokir
136	Peningkatan Jalan RW 05 Desa Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak	Desa Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	100 m	Pokir
137	Peningkatan Jalan RW 05 Mondosari Desa Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak	Desa Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	100 m	Pokir
138	Betonisasi Jalan Depan kantor KUA Demak kota RW 2 Kel bintoro kec Demak	Kel Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	50 m	Pokir
139	Pavingisasi Rt 5 Rw 13 Desa Batusasi	Desa Batusasi, Kec. Mranggen, Kab. Demak	Luas paving terpasang	430 m²	Pokir
140	Betonisasi rt 7 rw 19 pucang indah desa batusari	Desa Batusasi, Kec. Mranggen, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	50 m	Pokir
141	Drainase Rt 6 dan Rt 2 rt 8 Rw 40 Ivory Park Desa Batusari	Desa Batusasi, Kec. Mranggen, Kab. Demak	Panjang drainase terbangun	75 m	Pokir
142	Peningkatan Jalan Dukuh Deling Desa surodadi Sayung	Desa Surodadi, Kec. Sayung, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	100 m	Pokir
143	Penggururan Dukuh. Baru Desa surodadi kec Sayung kab Demak	Desa Surodadi, Kec. Sayung, Kab. Demak	Luas jalan terbangun	450 m	Pokir
144	REHABILITASI JALAN DUKUH TLOGOGEDONG RW 05 DS,TLOGOREJO KEC,KARANGAWEN KAB,DEMAK.	Ds. Tlogorejo, Kec. Karangawen, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	100 m	Pokir
145	Pembangunan Balai Rw 35 Plamongan Indah Desa Batusari	Desa Batusasi, Kec. Mranggen, Kab. Demak	Luas bangunan terbangun	19,5m²	Pokir
146	PENINGKATAN JALAN RW 04 DESA KEBONBATUR KEC. MRANGGEN KAB. DEMAK	Desa Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	50 m	Pokir
147	PAVINGISASI HALAMAN SD TAHFIDZ ROUDHOTUL QUR'AN DESA MRANAK KEC. WONOSALAM KAB. DEMAK	Desa Mranak, Kec. Wonosalam, Kab. Demak	Luas paving terpasang	240 m²	Pokir
148	PENINGKATAN JALAN RW. 01 KEL BETOKAN KEC DEMAK	Kel. Betokan, Kec. Demak, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	100 m	Pokir
149	Betonisasi jalan RT. 5/4 Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak	Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	50 m	Pokir
150	Betonisasi jalan RT 06 RW 02 Kedung Dolok Desa	Desa Banyumeneng, Kec. Mranggen, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	25 m	Pokir

No	Pekerjaan/ Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-7
	Banyumeneng Kec. Mranggen Kab. Demak				
151	Peningkatan Jl. Matohir Kedung Dolok Desa Banyumeneng Mranggen Demak	Desa Banyumeneng, Kec. Mranggen, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	35 m	Pokir
152	Betonisasi jalan RW 02 Desa Banyumeneng Kec. Mranggen Kab. Demak	Desa Banyumeneng, Kec. Mranggen, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	50 m	Pokir
153	Betonisasi lanjutan jalan RW 03 Barang, Desa Banyumeneng, Kec. Mranggen, Kab. Demak	Desa Banyumeneng, Kec. Mranggen, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	35 m	Pokir
154	Betonisasi jalan RW 04 Desa Banyumeneng, Kec. Mranggen, Kab. Demak	Desa Banyumeneng, Kec. Mranggen, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	35 m	Pokir
155	Betonisasi jalan menuju kandang sapi Karang Kumpul, Desa Banyumeneng, Kec. Mranggen, Kab. Demak	Desa Banyumeneng, Kec. Mranggen, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	35 m	Pokir
156	Betonisasi Jalan utama dukuh Kedung dolok Rw. 02 Desa Banyumeneng Kec. Mranggen Kab.Demak	Desa Banyumeneng, Kec. Mranggen, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	50 m	Pokir
157	Peningkatan lingkungan Jalan Krajan Lor RW 05 Desa Banyumeneng, Kec. Mranggen, Kab. Demak	Desa Banyumeneng, Kec. Mranggen, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	50 m	Pokir
158	Betonisasi jalan kedung dolok RT 08 RW 02 Desa Banyumeneng Kec. Mranggen Demak	Desa Banyumeneng, Kec. Mranggen, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	50 m	Pokir
159	Pembangunan talud RW 02 Dukuh Kuripan Desa Sidorejo Kec. Sayung	Desa Sidorejo, Kec. Sayung, Kab. Demak	Volume talud terbangun	270 m ³	Pokir
160	Peningkatan Jalan RT 14 RW 4 Desa Kembangarum Kec. Mranggen	Desa Kembangarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	100 m	Pokir
161	PENINGKATAN JALAN KRAJAN BARU DESA WONOSALAM KEC WONOSALAM	Desa Wonosalam, Kec Wonosalam, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	75 m	Pokir
162	betonisasi jalan dukuh bomo, getas wonosalam	Desa Getas, Kec. Wonosalam, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	50 m	Pokir
163	PEMBANGUNAN JALAN PENGHUBUNG DKH. BOYOLANGU KE DKH. MOROSOBO DS. TLOGOBOYO KEC. BONANG	Ds. Tlogoboyo, Kec. Bonang, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	50 m	Pokir
164	BETONISASI JALAN DESA KEDUNGWARU LOR KEC KARANGANYAR	Desa Kedungwaru Lor, Kec. Karanganyar, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	50 m	Pokir
165	BETONISASI JALAN DESA CANGKRING KEC KARANGANYAR	Desa Cangkring, Kec. Karanganyar, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	50 m	Pokir
166	BETONISASI JALAN DUKUH REJOSARI DESA KEDONDONG KECAMATAN GAJAH	Desa Kedondong, Kecamatan Gajah, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	50 m	Pokir
167	BETONISASI JALAN RT 5 RW 02 DESA TEGALARUM KECAMATAN MRANGGEN	Desa Tegalarum, Kecamatan Mranggen, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	50 m	Pokir
168	PEMBANGUNAN TALUD RW 01 DESA WARU KECAMATAN MRANGGEN	Desa Waru, Kecamatan Mranggen, Kab. Demak	Panjang talud terbangun	270 m	Pokir
169	PEMBANGUNAN TALUD RW 01 DESA TEGALARUM KECAMATAN MRANGGEN	Desa Tegalarum, Kecamatan Mranggen, Kab. Demak	Panjang talud terbangun	200 m	Pokir

No	Pekerjaan/ Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-7
170	PEMBANGUNAN TALUD RW 02 DESA TEGALARUM KECAMATAN MRANGGEN	Desa Tegalarum, Kecamatan Mranggen, Kab. Demak	Panjang talud terbangun	135 m	Pokir
171	Pembangunan jembatan RT 04/RW 06 Waru Kec. Mranggen, Demak	Desa Waru Kec. Mranggen, Kab. Demak	Volume Jembatan terbangun	450 m ²	Pokir
172	Kegiatan betonisasi Desa Bulusari RW. 04.Kec Sayung. Kab Demak.	Desa Bulusari, Kec Sayung, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	50 m	Pokir
173	PEMBANGUNAN JEMBATAN RW 01 DESA BULUSARI KEC. SAYUNG KAB. DEMAK	Desa Bulusari, Kec. Sayung, Kab. Demak	Panjang Jembatan terbangun	100 m	Pokir
174	PEMBUATAN JEMBATAN RW 04 DESA GAJI KEC. GUNTUR KAB. DEMAK	Desa Gaji, Kec. Guntur, Kab. Demak	Jumlah Jembatan yg terbangun	1 buah	Pokir
175	PEMBANGUNAN GAPURA KAMPUNG RT 02, 03, RW 04 DESA JUNGPASIR KEC. WEDUNG	Desa Jungpasir, Kec. Wedung. Kab. Demak	Luas bangunan terbangun	5 m ²	Pokir
176	BETONISASI JALAN DESA CABEAN KEC. DEMAK	Desa Cabean, Kec. Demak, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	75 m	Pokir
177	BETONISASI JALAN BLOK NDORO BAGUS DEPAN PAM DESA SEDA KEC. DEMAK	Desa Seda, Kec. Demak, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	50 m	Pokir
178	BETONISASI RT 02 RW 03 DESA TELUK KEC KARANGAWEN	Desa Teluk, Kec Karangawen, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	100 m	Pokir
179	Betonisasi jalan RT 05 RW 04 Dukuh Senggrong Desa Kangkung Kec. Mranggen	Desa Kangkung, Kec. Mranggen, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	75 m	Pokir
180	Penataan lingkungan RT 08 03 Dukuh Jawong Desa Kembangarum Kec. Mranggen	Desa Kembangarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak	Luas jalan terbangun	75 m	Pokir
181	BETONISASI JALAN MBAH NAKUDHO BANYU KEL. KALICILIK KEC. DEMAK KAB. DEMAK	Kel. Kalicilik, Kec. Demak, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	25 m	Pokir
182	BETONISASI JALAN MALIK IBRAHIM DS. KEDUNGWARU KIDUL KEC. KARANGANYAR	Ds. Kedungwaru, Kidul Kec. Karanganyar, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	60 m	Pokir
183	Betonisasi Sabuk Desa Ketanjung Kec Karanganyar	Desa Ketanjung, Kec. Karanganyar, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	50 m	Pokir
184	Peningkatan Jalan Penghubung Desa Gebangarum menuju Dukuh Glondong Ds Gebang Kec Bonang	Desa Gebang, Kec. Bonang, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	100 m	Pokir
185	BETONISASI RT 02 RW 04 DS. MUTIHKULON KEC. WEDUNG	Ds. Mutihkulon, Kec. Wedung, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	100 m	Pokir
186	PENGECORAN JALAN DUKUH WEDEAN DESA KRAMAT KECAMATAN DEMPET	Desa Kramat, Kecamatan Dempet, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	100 m	Pokir
187	PENGECORAN JALAN DUKUH NOSARI KALORAN DESA SARI KECAMATAN GAJAH	Desa Sari, Kecamatan Gajah, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	100 m	Pokir
188	PENGECORAN JALAN ANTAR DESA KRAMAT MENUJU KEBONSARI KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK	Kecamatan Dempet, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	100 m	Pokir
189	PENGECORAN JALAN ANTAR DESA KRAMAT MENUJU SURODADI KECAMATAN DEMPET	Kecamatan Dempet, Kab. Demak	Panjang jalan terbangun	200 m	Pokir

Analisis DINPERKIM 2025

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan antara lain :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045

Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi. Hal ini dilakukan dengan pemenuhan infrastruktur dan layanan dasar lainnya untuk mendukung kualitas sumber daya manusia, kualitas lingkungan hidup, penurunan kemiskinan, serta mendorong produktivitas ekonomi.

Penyediaan perumahan diarahkan untuk memastikan seluruh rumah tangga menempati rumah tangga yang layak, terjangkau dan berkelanjutan. Dari sisi pembiayaan perumahan, kebijakan difokuskan untuk meningkatkan rasio pembiayaan perumahan terhadap PDB. Kebijakan dilakukan melalui :

1. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau sesuai karakteristik wilayah;
2. Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan;
3. Penanganan permukiman kumuh dan peremajaan kota secara inklusif;
4. Reformasi subsidi perumahan yang lebih efisien dan tepat sasaran serta perluasan pembiayaan primer dan sekunder perumahan;
5. Reformasi perundang-undangan dan regulasi terkait kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di sektor perumahan.

2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, pembangunan perumahan tercantum pada pasal 129 huruf a yaitu: Dalam

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Amanat pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia sesuai pasal 15 adalah sebagai berikut:

- a) menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi;
- b) menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dengan berpedoman pada strategi nasional dan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa;
- c) teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- d) menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- e) menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota dalam penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;
- f) melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan;
- g) industri bahan bangunan yang mengutamakan sumberdaya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan;
- h) melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- i) melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota;
- j) melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;

- k) melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;
- l) melaksanakan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
- m) melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
- n) mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- o) mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;
- p) memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR;
- q) menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba; dan
- r) memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran DINPERKIM merupakan langkah strategis yang dilakukan sebagai bagian dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan sasaran ini tidak disusun secara terpisah, melainkan merupakan hasil dari proses yang berjenjang, yang diawali dengan identifikasi isu-isu penting dan strategis yang dihadapi oleh DINPERKIM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Isu-isu tersebut dapat mencakup berbagai aspek, antara lain terbatasnya ketersediaan rumah layak huni, kurangnya pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni, rendahnya kualitas kawasan permukiman yang layak huni, rendahnya kualitas kawasan permukiman.

Dalam konteks tersebut, tujuan dan sasaran dirumuskan dengan mengacu pada sasaran kinerja Renstra Perangkat Daerah serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak. Visi dan misi RPJMD menjadi rujukan utama dalam menentukan kontribusi strategis DINPERKIM terhadap pencapaian tujuan

pembangunan daerah, terutama dalam peningkatan ketersediaan dan kualitas kawasan dan permukiman layak huni. Dengan kata lain, tujuan dan sasaran yang ditetapkan harus mampu mencerminkan peran aktif DINPERKIM sebagai Perangkat Daerah yang membantu Bupati dalam menjalankan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman secara efektif dan terarah.

Tujuan merupakan rumusan umum mengenai hal-hal yang ingin dicapai dalam jangka menengah, yang menggambarkan kondisi ideal atau perubahan yang diharapkan terjadi sebagai dampak dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan. Sementara itu, sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang bersifat lebih spesifik, terukur, dan realistis, serta dapat dicapai dalam rentang waktu tertentu. Sasaran harus memiliki indikator kinerja yang jelas agar capaian dapat dipantau, dievaluasi, dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Perumusan tujuan dan sasaran juga mencerminkan komitmen DINPERKIM dalam memberikan hasil (output) dan dampak (outcome) yang nyata terhadap masyarakat. Output dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan harus mendukung pencapaian sasaran, sedangkan outcome yang dihasilkan harus memberikan impact atau pengaruh positif dalam jangka panjang.

Selain itu, perumusan ini juga mempertimbangkan prinsip integrasi vertikal dan horizontal. Secara vertikal, tujuan dan sasaran harus sejalan dengan kebijakan nasional, seperti RPJMN dan Renstra Kementerian Perhubungan, serta mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Secara horizontal, tujuan dan sasaran harus terkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya agar pengembangan dan peningkatan perumahan dan kawasan permukiman dapat terarah dan tidak tumpang tindih.

Dalam pelaksanaannya, perumusan tujuan dan sasaran juga memperhatikan kondisi aktual wilayah Kabupaten Demak, termasuk potensi, tantangan geografis, sosial, ekonomi, serta perkembangan teknologi. Semua itu dilakukan agar perencanaan pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman tidak bersifat normatif semata, tetapi kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.

Dengan demikian, tujuan dan sasaran dalam Renstra DINPERKIM

diharapkan menjadi pedoman strategis dalam pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman daerah yang terencana, terukur, terarah, dan berkelanjutan. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Demak. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan publik Dinperkim;
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja;
3. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni;
4. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif;
2. Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinperkim;
3. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni;
4. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman.

Sehubungan dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Renja DINPERKIM Tahun 2025 mempunyai beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Target Tujuan dan Sasaran DINPERKIM Tahun 2025

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	REALISASI		TARGET CAPAIAN		
		2024	2025 TW 1	RPJMD Pada tahun 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025
Tujuan 1. Meningkatkan pelayanan publik Dinperkim	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,86	NA	65	84,75	85
Sasaran 1.1 Terwujudnya pelayanan publik yang responsif	Persentase unsur pelayanan yang mencapai target	100	NA	100	100	100
Tujuan 2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sakip Dinperkim	78,55	78,60	70,77	79,97	79,97
Sasaran 2.1 Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinperkim	Persentase sasaran strategis Dinperkim yang mencapai target	100	0,00	100	100	100
Tujuan 3. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni	Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni	80,92	NA	83,29	83,29	83,29
Sasaran 3.1 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak	81,07	NA	82,46	82,46	82,46
Tujuan 4. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	Persentase kawasan permukiman layak huni	99,41	NA	99,35	99,35	99,46
Sasaran 4.1 Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase penurunan kawasan kumuh	47,06	NA	41,73	41,73	51,78

Renstra DINPERKIM 2021-2026

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah pencapaian visi Kepala Daerah:

“Demak Bermatabat, Maju dan Sejahtera”

Diterjemahkan pada misi pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2021–2026 menyatakan :

1. Memperkuat tata kelola Pemerintahan yang baik, serta kehidupan bermasyarakat yang agamis, kondusif dan berbudaya;
2. Meningkatkan sumber dayam manusia, sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

1. Dari ketiga misi Daerah Kabupaten Demak tersebut maka misi ketiga adalah misi yang diemban Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak yaitu **Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran** dengan cara menunjang peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kenyamanan sesuai standard hidup layak, setara dan berkeadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan kepada Perluasan kawasan perkotaan, dan pembangunan infrastruktur (pesisir, pertanian, pusat produksi). Sasaran strategis, merupakan target yang harus dicapai dalam meningkatkan ketercapaian SDG's di Kabupaten Demak. Sasaran strategis ini dirumuskan guna meningkatkan kinerja terhadap upaya mencapai target pembangunan berkelanjutan pada RPJMD. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengarah dan ikut mendukung pencapaian tujuan SDG's 11.1 Kota dan permukiman yang berkelanjutan dengan indikator nasional : Proporsi rumah tangga yang memiliki hunian yang layak dan terjangkau, sedangkan untuk indikator daerah :

Persentase kawasan permukiman layak huni dengan target 99,35%.

Pada tahun 2025, DINPERKIM mempunyai pagu anggaran awal sebesar Rp 66.193.909.900,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Pada perjalanannya, pagu tersebut mengalami pergeseran akibat efisiensi anggaran di awal tahun sebesar Rp 536.269.000,- pada rekening perjalanan dinas sebesar 50%. Sehingga total pagu setelah adanya efisiensi berkurang menjadi Rp 65.657.640.900,-.

Namun pada rencana anggaran Perubahan 2025, terdapat usulan penambahan anggaran senilai Rp 14.990.935.509,-. Perubahan tersebut sebagian besar terjadi Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU. Sehingga berdasarkan beberapa penyesuaian tersebut, anggaran perubahan bertambah menjadi Rp80.648.576.409,-.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :

1. Jumlah program dan kegiatan

Program kegiatan strategis dinas pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terbagi kedalam 2 (dua) program yaitu :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp 8.961.826.409,-
- Program Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sebesar Rp 71.686.750.000,-

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan Penyebaran program dilakukan di Kabupaten Demak, dengan sifat penyebaran sebagai berikut :

- Kawasan lingkungan perumahan dan permukiman tersebar di Kabupaten Demak serta pada kawasan kumuh;
- Kawasan bencana;
- Kawasan strategis sesuai RT/RW Kabupaten Demak.

3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut penggunaan dananya Kebutuhan dana Tahun 2025 sebesar Rp80.648.576.409,- bertambah Rp 14.990.935.509,- dari pagu awal. Tabel rencana program, kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
						DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN PERMUKIMAN																	
	1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									80.648.576.409						105.843.403.273	DINPEKIM	
I.A	1	4	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	100	200	100	100	100	6.830.589.900	6.830.589.900	8.961.826.409	Kab. Demak	APBD			100	6.791.935.988	DINPEKIM	
1	1	4	1	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah	10	20	10	10	10	111.680.000	111.680.000	87.580.000	Kab. Demak	APBD			10	15.000.000	DINPEKIM	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
																				Nasional		Daerah		
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
a	1	4	1	201	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan	3	6	3	3	3	24.800.000	24.800.000	24.800.000	Kab. Demak	APBD				3	5.000.000	DINPEKIM
b	1	4	1	201	4		Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	8	4	4	4	43.680.000	43.680.000	19.580.000	Kab. Demak	APBD				4	5.000.000	DINPEKIM
c	1	4	1	201	6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	6	3	3	3	43.200.000	43.200.000	43.200.000	Kab. Demak	APBD				3	5.000.000	DINPEKIM

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			
																				Nasional		Daerah	
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
2	1	4	1	202			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	1	2	1	1	1	6.718.909.900	6.718.909.900	6.539.845.409	Kab. Demak	APBD			1	5.137.642.988	DINPEKIM
a	1	4	1	202		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31	66	31	31	31	5.105.795.000	5.105.795.000	5.076.730.509	Kab. Demak	APBD			31	3.876.393.035	DINPEKIM
b	1	4	1	202		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	50	1	1	1	1.613.114.900	1.613.114.900	1.463.114.900	Kab. Demak	APBD			1	1.261.249.953	DINPEKIM
I.B	1	4	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100	200	100	100	100	2.273.320.000	2.273.320.000	2.525.853.500	Kab. Demak	APBD			100		DINPEKIM



No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelo mpo k Sas ara n	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokas i		Sumb er Dana	Prioritas				
																				Nasi onal		Dae rah		
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	1	4	1	203			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi	2	4	2	2	2	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kab. Demak	APBD				2	5.000.000	DINPEKIM
a	1	4	1	203	1		Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	4	2	2	2	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kab. Demak	APBD				2	5.000.000	DINPEKIM
2	1	4	1	205			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	200	100	100	100	425.000.000	425.000.000	369.250.000	Kab. Demak	APBD				100	250.000.000	DINPEKIM
a	1	4	1	205	9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	304	176	76	76	76	325.000.000	325.000.000	269.250.000	Kab. Demak	APBD				76	200.000.000	DINPEKIM



No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kategori Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			
																				Nasional		Daerah	
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
b		1	4	1	205	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20	-	5	5	5	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kab. Demak	APBD			5	50.000.000	DINPEKIM
3		1	4	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	200	100	100	100	829.525.000	829.525.000	862.405.000	Kab. Demak	APBD			100	681.962.000	DINPEKIM
a		1	4	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	3	1	1	1	15.454.000	15.454.000	15.454.000	Kab. Demak	APBD			1	15.609.000	DINPEKIM



No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kategori Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			
																				Nasional		Daerah	
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
b	1	4	1	206	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	2	1	1	1	186.430.000	186.430.000	191.999.000	Kab. Demak	APBD			1	188.245.000	DINPEKIM
c	1	4	1	206	3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	3	1	1	1	80.000.000	80.000.000	80.000.000	Kab. Demak	APBD			1	52.030.000	DINPEKIM
d	1	4	1	206	5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	3	1	1	1	133.393.000	133.393.000	133.939.000	Kab. Demak	APBD			1	135.278.000	DINPEKIM
e	1	4	1	206	6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	50	94	10	10	10	17.500.000	17.500.000	17.500.000	Kab. Demak	APBD			10	10.406.000	DINPEKIM



No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelo mpo k Sas ara n	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokas i		Sumb er Dana	Prioritas			
																				Nasi onal		Dae rah	
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
f	1	4	1	206	9		Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	3	1	1	1	330.100.000	330.100.000	304.411.000	Kab. Demak	APBD			1	275.394.000	DINPEKIM
g	1	4	1	206	10		Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6	12	6	6	6	21.951.000	21.951.000	21.951.000	Kab. Demak	APBD			6	5.000.000	DINPEKIM
h	1	4	1	206	11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	9	6	2	2	2	107.151.000	107.151.000	97.151.000	Kab. Demak	APBD					DINPEKIM
4	1	4	1	207			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	39	69	8	8	8	480.795.000	480.795.000	627.746.000	Kab. Demak	APBD			8	130.000.000	DINPEKIM



No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelo mpo k Sas ara n	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokas i		Sumb er Dana	Prioritas				
																				Nasi onal		Dae rah		
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
a	1	4	1	207	5		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18	31	3	3	0	42.595.000	42.595.000	0	Kab. Demak	APBD				3	30.000.000	DINPEKIM
b	1	4	1	207	6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13	32	5	5	5	438.200.000	438.200.000	627.746.000	Kab. Demak	APBD				5	100.000.000	DINPEKIM
5	1	4	1	208			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	100	200	100	100	100	35.000.000	35.000.000	35.000.000	Kab. Demak	APBD				100	41.624.000	DINPEKIM
a	1	4	1	208	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8120	5715	2060	2060	2060	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kab. Demak	APBD				2080	20.812.000	DINPEKIM

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelo mpo k Sas ara n	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokas i		Sumb er Dana	Prioritas				
																				Nasi onal		Dae rah		
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
b	1	4	1	208	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	36	12	12	12	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kab. Demak	APBD				12	20.812.000	DINPEKIM
6	1	4	4	209			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara	100	200	100	194	100	420.000.000	420.000.000	420.000.000	Kab. Demak	APBD				100	530.707.000	DINPEKIM
a	1	4	1	209	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21	42	21	150	21	250.000.000	250.000.000	250.000.000	Kab. Demak	APBD				21	353.805.000	DINPEKIM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
																			Nasional		Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
b	1	4	1	209	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	194	388	194	83,29	194	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kab. Demak	APBD				194	20.812.000	DINPEKIM
c	1	4	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150	300	150	82,46	150	150.000.000	150.000.000	150.000.000	Kab. Demak	APBD				150	156.090.000	DINPEKIM
II	1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi rumah tangga korban bencana/relokasi program	100	200	100	100	100	4.860.000.000	4.860.000.000	4.258.960.000	Kab. Demak	APBD				100	6.404.902.979	DINPEKIM
1	1	4	2	201		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Data Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana atau terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	15	9	3	3	3	150.000.000	150.000.000	117.850.000	Kab. Demak	APBD				3	150.000.000	DINPEKIM



No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
																				Nasional		Daerah		
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
a	1	4	2	201	3		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	5	3	1	1	1	50.000.000	50.000.000	37.650.000	Kab. Demak	APBD				1	50.000.000	DINPEKIM
b	1	4	2	201	4		Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	5	3	1	1	1	50.000.000	50.000.000	45.000.000	Kab. Demak	APBD				1	50.000.000	DINPEKIM
c	1	4	1	201	7		Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	5	1	1	1	1	50.000.000	50.000.000	35.200.000	Kab. Demak	APBD				1	50.000.000	DINPEKIM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			
																			Nasional		Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
2	1	4	2	202		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Cakupan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana / Relokasi Program	100	200	100	100	100	460.000.000	460.000.000	253.660.000	Kab. Demak	APBD			100	299.068.000	DINPEKIM
a	1	4	2	202	1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	30	1600	300	30	300	193.267.000	193.267.000	133.389.000	Kab. Demak	APBD			30	50.000.000	DINPEKIM
b	1	4	2	202	4	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	30	15	6	6	6	266.733.000	266.733.000	120.271.000	Kab. Demak	APBD			8	249.068.000	DINPEKIM

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelo mpo k Sas ara n	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokas i		Sumb er Dana	Prioritas				
																				Nasi onal		Dae rah		
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
3	1	4	2	203			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah layak huni bagi korban bencana yang dibangun dan direhab	997	909	172	172	172	4.000.000.000	4.000.000.000	3.600.000.000	Kab. Demak	APBD				260	5.405.834.479	DINPEKIM
a	1	4	2	203		1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	650	677	200	100	200	2.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000	Kab. Demak	APBD				200	2.005.834.979	DINPEKIM
b	1	4	2	203		4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	209	179	30	34	30	1.500.000.000	1.500.000.000	2.000.000.000	Kab. Demak	APBD				30	1.500.000	DINPEKIM
c	1	4	2	203		6	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	300		180	180	180	-	-	600.000.000	Kab. Demak	APBD				30	300.000.000	DINPEKIM



No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			
																				Nasional		Daerah	
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
d		1	4	2	203	11	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jml rumah khusus / rumah sementara beserta PSU yang dibangun		53	10	-	-	500.000.000	500.000.000	-		APBD			-	-	DINPEKIM
4		1	4	2	206		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Rekomendasi izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang dikeluarkan	100	200	100	100	100	250.000.000	250.000.000	287.450.000	Kab. Demak	APBD			100	50.000.000	DINPEKIM
a		1	4	2	206	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	5	1	1	1	1	250.000.000	250.000.000	287.450.000	Kab. Demak	APBD			1	50.000.000	DINPEKIM



No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
																				Nasional		Daerah		
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
III	1	4	3				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	100	163,32	87,30	87,30	87,30	1.785.000.000	1.785.000.000	1.703.180.000	Kab. Demak	APBD				100	3.000.000.000	DINPEKIM
1	1	4	3	203			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luasan Kumuh pada permukiman kumuh dengan luas < 10 Ha yang ditangani	6,38	1,04	0,56	0,56	0,56	1.785.000.000	1.785.000.000	1.703.180.000	Kab. Demak	APBD				0,81	2.550.000.000	DINPEKIM
a	1	4	3	203	4		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian, Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan, Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	5	5	1	1	1	235.000.000	235.000.000	153.180.000	Kab. Demak	APBD				1	250.000.000	DINPEKIM



No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			
																				Nasional		Daerah	
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
b	1	4	3	203	7		Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Dokumen hasil verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh	5	2	1	1	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kab. Demak	APBD			1	100.000.000	DINPEKIM
c	1	4	3	203	13		Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar		1,04	0,56	-	0,56	1.450.000.000	1.450.000.000	1.450.000.000	Kab. Demak	APBD			-	-	DINPEKIM
IV	1	4	4				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase kawasan permukiman di luar kawasan kumuh di bawah 10 ha yang ditangani	39	92,63	36	36	36	3.820.000.000	3.820.000.000	3.634.610.000	Kab. Demak	APBD			39	87.056.564.306	DINPEKIM
1	1	4	4	201			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah permukiman di luar kawasan kumuh di bawah 10 ha yang ditangani	100	60	20	20	20	3.820.000.000	3.820.000.000	3.634.610.000	Kab. Demak	APBD			20	87.056.564.306	DINPEKIM



No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			
																				Nasional		Daerah	
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
a	1	4	4	201	1		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	2411	2265	229	515	229	3.705.000.000	3.705.000.000	3.552.920.000	Kab. Demak	APBD			515	16.225.000.000	DINPEKIM
b	1	4	4	201	7		Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	-	-	-	-	1	115.000.000	115.000.000	81.690.000	Kab. Demak	APBD			1	70.831.564.306	DINPEKIM

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
																				Nasional		Daerah		
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
V	1	4	5				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PSU	Persentase Rumah yang mendapatkan pelayanan PSU Layak	100	280	100	100	100	46.625.000.000	46.625.000.000	62.090.000.000	Kab. Demak	APBD				100	2.590.000.000	DINPEKIM
1	1	4	5	201			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lingkungan perumahan yang tersedia PSU dengan baik	50	22	10	10	10	46.625.000.000	46.625.000.000	62.090.000.000	Kab. Demak	APBD				10	2.590.000.000	DINPEKIM
a	1	4	5	201	2		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	50	22	10	10	10	46.625.000.000	46.625.000.000	62.090.000.000	Kab. Demak	APBD				10	2.590.000.000	DINPEKIM

Analisis DINPERKIM 2025

Dalam rangka aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Demak, Pemerintah Kabupaten Demak menargetkan prevelensi stunting tahun 2025 sebesar 11,86%. Agar pelaksanaan aksi konvergensi berhasil dan berdaya guna, Dinperkim mendukung pelaksanaan aksi tersebut dengan program/ kegiatan/ subkegiatan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
2. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
3. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 - Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh
4. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

4.2 Program Prioritas dan Rencana Implementasi

Dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026 melaksanakan Rencana Program dan kegiatan prioritas mengacu pada program prioritas Bupati Demak sbb:

1. Bantuan rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni/rumah korban bencana)

Bantuan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) diberikan secara bertahap dengan prioritas kelompok Rumah Tangga Miskin pada desil 1 (sangat

miskin). Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan fakir miskin dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) diperlukan sinergitas, peningkatan akses, dan integrasi layanan dan validitas data kemiskinan melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) yang dilakukan secara *online* dan *realtime*. Pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni Bagi Korban Bencana di Kabupaten Demak dilaksanakan melalui dua intervensi yakni yang pertama intervensi berupa pendataan dan sosialisasi Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten. Kedua berupa intervensi fisik melalui pemberian bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten.

Penanganan RTLH sesuai data DTKS di prioritaskan pada kondisi keluarga miskin berdasarkan desil yang perlu penanganan adalah Desil 1 merupakan KK miskin yang parah, dengan jumlah 4.018 KK. Adanya pembagian tugas penanganan RTLH sesuai Desil 1 dengan mekanisme Pemda menangani 60% yaitu 2.411 KK dan Pemdes menangani 40% yaitu 1.607 KK yang ditangani periode 5 tahun.

Jumlah RTLH yang ditangani sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebanyak 8 Unit yang didukung pendanaan dari APBD Kabupaten Demak, namun ada yang ditangani dengan pendanaan dari berbagai *stakeholder* terkait baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi, CSR (Corporate Social Responsibility), BAZNAS, swadaya masyarakat dan lainnya.

Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten melalui mekanisme BANSOS dengan target sebanyak 222 Unit Rumah, yang terdiri dari 100 unit Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana (bantuan material), 34 Unit Pembangunan Baru (PB) bagi Korban Bencana dan 88 Unit Rumah Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program.

Adapun Tabel rencana program prioritas dan rencana implementasi sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Rumusan Rencana Program Prioritas dan Rencana Implementasi Tahun 2025 sesuai Renstra Tahun 2021 - 2026

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	REALISASI s.d 2025 TW 1		TARGET 2025		TARGET 2026		TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	Kode Subkegiatan	Ket.
					Realisasi Kinerja	Realisasi anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Bantuan rehabilitasi RTLH/rumah korban bencana						737	20.925.000.000					
a	Bantuan rehabilitasi RTLH	Jumlah Unit Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	unit rumah	5611	8	133.908.000	515	13.825.000.000	515	16.225.000.000	2411	1.04.04.2.01.01	
b	Rumah Korban Bencana	Jumlah rumah layak huni bagi korban bencana yang direhab kembali	unit rumah	23	10	185.1350.000	100	1.000.000.000	200	2.005.834.979	650	1.04.02.2.03.01	
		Jumlah rumah layak huni bagi korban bencana yang dibangun	unit rumah	N/A	0	-	34	1.700.000.000	30	1.500.000.000	175	1.04.02.2.03.04	
		Jml rumah khusus / rumah sementara beserta PSU yang dibangun bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	unit rumah	N/A	0	-	88	4.400.000.000	30	1.500.000.000	222	1.04.02.2.03.05	

Analisis DINPERKIM 2025

Dalam Program Unggulan Bupati terpilih 2021-2026, DINPERKIM turut berkontribusi dalam mendukung program unggulan Bupati 2021-2026 dengan rumusan rencana Program Prioritas yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3.
Rumusan Rencana Program Prioritas dan Rencana Implementasi Tahun 2026 sesuai Program Unggulan Bupati Periode 2025 - 2029

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data Awal (2024)		PROYEKSI 2025		TARGET 2026		TARGET AKHIR 2029		Kode Subkegiatan	Ket.
				Realisasi Kinerja	Realisasi anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Demak Tangguh dan Lestari												
	Pengantasan kemiskinan melalui peningkatan akses layanan dasar (Kesehatan, pendidikan, perumahan layak dan bantuan sosial												
I	Bantuan rehabilitasi RTLH/rumah korban bencana												
a	Bantuan rehabilitasi RTLH	Jumlah Unit Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	unit rumah	2250	36.082.186.000	226	3.705.000.000	500	10.250.000.000	2500	51.250.000.000	1.04.04.2.01.01	
b	Rumah Korban Bencana	Jumlah rumah layak huni bagi korban bencana yang direhab kembali	unit rumah	488	2.179.400.000	100	2.000.000.000	100	1.000.000.000	500	5.000.000.000	1.04.02.2.03.01	
		Jumlah rumah layak huni bagi korban bencana yang dibangun	unit rumah	179	9.539.000.000	30	1.500.000.000	30	1.500.000.000	150	7.500.000.000	1.04.02.2.03.04	

Analisis DINPERKIM 2025

BAB V.

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak tahun 2025 merupakan suatu dokumen formal dalam kaitannya dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu instrument yang digunakan oleh komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan diakhiri dengan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

5.1 Catatan Penting

Dari uraian permasalahan dan program pembangunan bidang perumahan dan permukiman di Kabupaten Demak, antara lain dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai keberhasilan terhadap visi dan misi Kepala Daerah yaitu pada misi ketiga ***Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran*** dengan cara menunjang peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kenyamanan sesuai standar hidup layak, setara dan berkeadilan serta mengurangi kemiskinan, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan kepada Perluasan kawasan perkotaan, dan pembangunan infrastruktur (pesisir, pertanian, pusat produksi). Maka dalam pencapaian kebijakan pembangunan tersebut, DINPERKIM perlu dukungan baik dari masyarakat, swasta maupun Pemerintah Pusat melalui sumber pendanaan dan partisipasi.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

RENJA tahun 2025 merupakan acuan bagi DINPERKIM Kabupaten Demak, masyarakat dan semua pelaku pembangunan dalam mencapai sinergitas pelaksanaan program pembangunan di Daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RENJA tahun 2025, sebagai berikut :

1. DINPERKIM dan semua pelaku pembangunan berkewajiban melaksanakan program-program Perubahan RENJA tahun 2025 dengan sebaik-baiknya.

2. Perubahan RENJA tahun 2025 menjadi acuan dan pedoman bagi OPD dalam menyusun kebijakan publik.
3. Pada akhir tahun anggaran 2025, DINPERKIM wajib melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun 2025, serta kesesuaiannya dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD Kabupaten Demak.

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan Program, DINPERKIM wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala setiap bulan kepada Bupati Demak melalui Bappelitbangda Kabupaten Demak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Adapun Rencana Tindak Lanjut dalam Pelaksanaan Program dan kegiatan di DINPERKIM 2025, dibidang pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya:

1. Memaksimalkan dan mensinergikan tupoksi Aparatur DINPERKIM;
2. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan *stakeholder* lain yang terkait;
3. Meningkatkan kualitas permukiman layak huni dengan cara mengurangi jumlah rumah tidak layak huni;
4. Meningkatkan kualitas hidup korban pasca bencana melalui bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan membangun sarpras penunjang permukiman;
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan cara melakukan pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan, jembatan, talud, serta sarana dan prasarana perdesaan lainnya.
6. Guna menjamin konsistensi terlaksananya program sesuai dokumen perencanaan pembangunan Rencana Strategis Dinas Permukiman Kabupaten Demak 2021-2026 ini perlu didukung

dengan komitmen pendanaan pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten dengan proporsi *prosentase* 35 : 25 : 40.

Keberhasilan Renja DINPERKIM ini sangat tergantung pada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf DINPERKIM. Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja DINPERKIM juga sangat tergantung kepada *eksternal* yang bekerja sama dan berkoordinasi dengan DINPERKIM Kabupaten Demak. Dengan telah tersusunnya dokumen Perubahan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025 ini agar senantiasa dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan setiap Program dan kegiatan serta tugas-tugas yang dilaksanakan oleh DINPERKIM Kabupaten Demak. Demikian Perubahan Rencana Kerja DINPERKIM Kabupaten Demak tahun 2025 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja DINPERKIM dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Lampiran 1.

PENYESUAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA INDIKATORNYA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021-2026
DENGAN KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-3406 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021 TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN
KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1	4	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti		1	4	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	
1	4	1	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran		1	4	1	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		Jumlah dokumen perencanaan ,	

SEMULA									MENJADI								
U R U S A N / U N S U R	B I D A N G U R U S A N / B I D A N G U N S U R	P R O G R A M	K E G I A T A N	S U B K E G I A T A N	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	U R U S A N / U N S U R	B I D A N G U R U S A N / B I D A N G U N S U R	P R O G R A M	K E G I A T A N	S U B K E G I A T A N	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
					Perangkat Daerah		dan laporan kinerja perangkat daerah							Perangkat Daerah		penganggara n dan laporan kinerja perangkat daerah	
1	4	1	201	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		jumlah dokumen perencanaan		1	4	1	201	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		jumlah dokumen perencanaan	
1	4	1	201	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1	4	1	201	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
1	4	1	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar		1	4	1	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	

SEMULA									MENJADI								
U R U S A N / U N S U R	BI DA NG UR US AN / BI DA NG UN SU R	PR OG RA M	KEGI ATAN	SU B KE GI ATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	U R U S A N / U N S U R	BI DA NG UR US AN / BI DA NG UN SU R	PR OG RA M	KEGI ATAN	SUB KEGIA TAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
					Kinerja SKPD		Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							Kinerja SKPD		Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
1	4	1	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan		1	4	1	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan	
1	4	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1	4	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
1	4	1	202	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan		Jumlah Dokumen Hasil		1	4	1	202	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan		Jumlah Dokumen Hasil	

SEMULA								MENJADI									
U R U S A N / U N S U R	BI DA NG UR US AN / BI DA NG UN SU R	PR OG RA M	KEGI ATAN	SU B KE GI AT AN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	U R U S A N / U N S U R	BI DA NG UR US AN / BI DA NG UN SU R	PR OG RA M	KEGI ATAN	SUB KEGIA TAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
					Tugas ASN		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							Tugas ASN		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
1	4	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan		1	4	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	
1	4	1	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi		1	4	1	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi	
1	4	1	203	1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD		1	4	1	203	1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD	

SEMULA									MENJADI								
U R U S A N / U N S U R	B I D A N G U R U S A N / B I D A N G U N S U R	P R O G R A M	K E G I A T A N	S U B K E G I A T A N	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	U R U S A N / U N S U R	B I D A N G U R U S A N / B I D A N G U N S U R	P R O G R A M	K E G I A T A N	S U B K E G I A T A N	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1	4	1	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi		1	4	1	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah yang terpenuhi	
1	4	1	205	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		1	4	1	205	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	
1	4	1	205	-	-	-			1	4	1	205		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
1	4	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi		1	4	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1	4	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	4	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
1	4	1	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	4	1	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
1	4	1	206	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1	4	1	206	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	

SEMULA									MENJADI								
U R U S A N / U N S U R	B I D A N G U R U S A N / B I D A N G U N S U R	P R O G R A M	K E G I A T A N	S U B K E G I A T A N	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	U R U S A N / U N S U R	B I D A N G U R U S A N / B I D A N G U N S U R	P R O G R A M	K E G I A T A N	S U B K E G I A T A N	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1	4	1	206	5	Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1	4	1	206	5	Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	
1	4	1	206	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUnd angan yang Disediakan		1	4	1	206	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangU ndangan yang Disediakan	
1	4	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	4	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
1	4	1	206	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip		1	4	1	206	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip	

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
							Dinamis pada SKPD									Dinamis pada SKPD	
1	4	1	206	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1	4	1	206	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
1	4	1	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah BMD yang diadakan		1	4	1	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah BMD yang diadakan	
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas yang Disediakan							-		-	
1	4	1	207	5	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1	4	1	207	5	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1	4	1	207	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1	4	1	207	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
1	4	1	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jasa Penunjang Urusan yang tersedia		1	4	1	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	
1	4	1	208	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1	4	1	208	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
1	4	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1	4	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
1	4	1	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang		Jumlah BMD yang terpelihara		1	4	1	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang		Jumlah BMD yang terpelihara	

SEMULA									MENJADI								
U R U S A N / U N S U R	BI DA NG UR US AN / BI DA NG UN SU R	PR OG RA M	KEGI ATAN	SU B KE GI ATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	U R U S A N / U N S U R	BI DA NG UR US AN / BI DA NG UN SU R	PR OG RA M	KEGI ATAN	SUB KEGIA TAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
					Urusan Pemerintahan Daerah									Urusan Pemerintahan Daerah			
1	4	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1	4	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
1	4	1	209	5	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara		1	4	1	209	5	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	
1	4	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1	4	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi rumah tangga		1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi rumah	

SEMULA									MENJADI								
U R U S A N / U N S U R	B I D A N G U R U S A N / B I D A N G U N S U R	P R O G R A M	K E G I A T A N	S U B K E G I A T A N	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	U R U S A N / U N S U R	B I D A N G U R U S A N / B I D A N G U N S U R	P R O G R A M	K E G I A T A N	S U B K E G I A T A N	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
							korban bencana/relo kasi program									tangga korban bencana/relo okasi program	
1	4	2	201		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kot a		Data Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana atau terdampak relokasi program pemerintah kabupaten		1	4	2	201		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Data Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana atau terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	
1	4	2	201	3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Ko ta Kejadian Sebelumnya yang Belum		1	4	2	201	3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/K ota Kejadian Sebelumnya	

SEMULA									MENJADI								
U R U S A N / U N S U R	B I D A N G U R U S A N / B I D A N G U N S U R	P R O G R A M	K E G I A T A N	S U B K E G I A T A N	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	U R U S A N / U N S U R	B I D A N G U R U S A N / B I D A N G U N S U R	P R O G R A M	K E G I A T A N	S U B K E G I A T A N	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
							Tertangani									yang Belum Tertangani	
1	4	2	201	4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana		Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Ko ta berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah		1	4	2	201	4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana		Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/K ota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	
1	4	2	201	7	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Ko ta		1	4	2	201	7	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/K ota	
1	4	2	202		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi		Cakupan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan		1	4	2	202		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi		Cakupan Sosialisasi dan Persiapan	

SEMULA									MENJADI								
U R U S A N / U N S U R	B I D A N G U R U S A N / B I D A N G U N S U R	P R O G R A M	K E G I A T A N	S U B K E G I A T A N	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	U R U S A N / U N S U R	B I D A N G U R U S A N / B I D A N G U N S U R	P R O G R A M	K E G I A T A N	S U B K E G I A T A N	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
					Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana / Relokasi Program							Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana / Relokasi Program	
1	4	2	202	1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Suk arelawan Tanggap Bencana		Jumlah Orang/Sukarela awan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota		1	4	2	202	1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Suk arelawan Tanggap Bencana		Jumlah Orang/Sukarela awan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	
1	4	2	202	1	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator		Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator		1	4	2	202	1	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator		Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping,	

SEMULA									MENJADI								
U R U S A N / U N S U R	B I D A N G U R U S A N / B I D A N G U N S U R	P R O G R A M	K E G I A T A N	S U B K E G I A T A N	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	U R U S A N / U N S U R	B I D A N G U R U S A N / B I D A N G U N S U R	P R O G R A M	K E G I A T A N	S U B K E G I A T A N	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
							yang Terbentuk dan Terlatih									dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	
1	4	2	203		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kot a		Jumlah rumah layak huni bagi korban bencana yang dibangun dan direhab		1	4	2	203		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah rumah layak huni bagi korban bencana yang dibangun dan direhab	
1	4	2	203	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Ko ta yang Terehabilitasi		1	4	2	203	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/K ota yang Terehabilitasi	
1	4	2	203	4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Ko ta yang Terbangun		1	4	2	203	4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/K ota yang Terbangun	

SEMULA									MENJADI								
U R U S A N / U N S U R	B I D A N G U R U S A N / B I D A N G U N S U R	P R O G R A M	K E G I A T A N	S U B K E G I A T A N	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	U R U S A N / U N S U R	B I D A N G U R U S A N / B I D A N G U N S U R	P R O G R A M	K E G I A T A N	S U B K E G I A T A N	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1	4	2	203	11	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jml rumah khusus / rumah sementara beserta PSU yang dibangun		1	4	2	203	11	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jml rumah khusus / rumah sementara beserta PSU yang dibangun	
1	4	2	206		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Persentase Rekomendasi izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang dikeluarkan		1	4	2	206		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Persentase Rekomendasi izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang dikeluarkan	
1	4	2	206	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan		1	4	2	206	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang /Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin	

SEMULA									MENJADI								
U R U S A N / U N S U R	B I D A N G U R U S A N / B I D A N G U N S U R	P R O G R A M	K E G I A T A N	S U B K E G I A T A N	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	U R U S A N / U N S U R	B I D A N G U R U S A N / B I D A N G U N S U R	P R O G R A M	K E G I A T A N	S U B K E G I A T A N	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
							Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik									Pembanguna n dan Pengembang an Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	
1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani		1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	
					Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		Persentase Rekomendasi izin Pembangunan dan Pengembang an Kawasan Permukiman yang diterbitkan							-		-	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan							-		-	

SEMULA									MENJADI								
U R U S A N / U N S U R	BI DA NG UR US AN / BI DA NG UN SU R	PR OG RA M	KEGI ATAN	SU B KE GI AT AN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	U R U S A N / U N S U R	BI DA NG UR US AN / BI DA NG UN SU R	PR OG RA M	KEGI ATAN	SUB KEGIA TAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
					Kawasan Permukiman		Sinkronisasi Penyelenggara an Kawasan Permukiman										
1	4	3	203		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Luasan Kumuh pada permukiman kumuh dengan luas < 10 Ha yang ditangani		1	4	3	203		Luasan Kumuh pada permukiman kumuh dengan luas < 10 Ha yang ditangani		Luasan Kumuh pada permukiman kumuh dengan luas < 10 Ha yang ditangani	
1	4	3	203	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian, Penyelenggaraan Pemugaran/Pere majaan, Permukiman Kumuh		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggara an Pemugaran/Pe remajaan Permukiman Kumuh		1	4	3	203	4	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Pere majaan Permukiman Kumuh		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggar aan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	
1	4	2	203	7	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan		Dokumen hasil verifikasi penyelenggara		1	4	2	203	7	Dokumen hasil verifikasi penyelenggaraan		Dokumen hasil verifikasi	

SEMULA									MENJADI								
U R U S A N / U N S U R	BI DA NG UR US AN / BI DA NG UN SU R	PR OG RA M	KEGI ATAN	SU B KE GI ATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	U R U S A N / U N S U R	BI DA NG UR US AN / BI DA NG UN SU R	PR OG RA M	KEGI ATAN	SUB KEGIA TAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
					Kawasan Permukiman Kumuh		an kawasan permukiman kumuh							kawasan permukiman kumuh		penyelenggara an kawasan permukiman kumuh	
1	4	2	203	13	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh		Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar		1	4	2	203	13	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar		Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	
1	4	4			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Persentase kawasan permukiman di luar kawasan kumuh di bawah 10 ha yang ditangani		1	4	4			Persentase kawasan permukiman di luar kawasan kumuh di bawah 10 ha yang ditangani		Persentase kawasan permukiman di luar kawasan kumuh di bawah 10 ha yang ditangani	
1	4	4	201		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kot a		Jumlah permukiman di luar kawasan kumuh di bawah 10 ha yang ditangani		1	4	4	201		Jumlah permukiman di luar kawasan kumuh di bawah 10 ha yang ditangani		Jumlah permukiman di luar kawasan kumuh di bawah 10 ha yang ditangani	
1	4	4	201	1	Perbaikan Rumah Tidak		Jumlah Rumah Tidak		1	4	4	201	1	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni		Jumlah Rumah Tidak	

SEMULA									MENJADI								
U R U S A N / U N S U R	B I D A N G U R U S A N / B I D A N G U N S U R	P R O G R A M	K E G I A T A N	S U B K E G I A T A N	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	U R U S A N / U N S U R	B I D A N G U R U S A N / B I D A N G U N S U R	P R O G R A M	K E G I A T A N	S U B K E G I A T A N	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
					Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangny a Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki							untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembang nya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	
1	4	4	201	-	-				1	4	4	201	7	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap	

SEMULA									MENJADI								
U R U S A N / U N S U R	B I D A N G U R U S A N / B I D A N G U N S U R	P R O G R A M	K E G I A T A N	S U B K E G I A T A N	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	U R U S A N / U N S U R	B I D A N G U R U S A N / B I D A N G U N S U R	P R O G R A M	K E G I A T A N	S U B K E G I A T A N	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
														Kumuh Baru		Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PSU		Persentase Rumah yang mendapatkan pelayanan PSU Layak		1	4	5			Persentase Rumah yang mendapatkan pelayanan PSU Layak		Persentase Rumah yang mendapatkan pelayanan PSU Layak	
1	4	5	201		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Jumlah lingkungan perumahan yang tersedia PSU dengan baik		1	4	5	201		Jumlah lingkungan perumahan yang tersedia PSU dengan baik		Jumlah lingkungan perumahan yang tersedia PSU dengan baik	
1	4	5	201	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum		1	4	5	201	2	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan	

SEMULA									MENJADI								
U R U S A N / U N S U R	B I D A N G U R U S A N / B I D A N G U N S U R	P R O G R A M	K E G I A T A N	S U B K E G I A T A N	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	U R U S A N / U N S U R	B I D A N G U R U S A N / B I D A N G U N S U R	P R O G R A M	K E G I A T A N	S U B K E G I A T A N	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
					Fungsi Hunian		yang Menunjang Fungsi Hunian							yang Menunjang Fungsi Hunian		Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	

Analisis DINPERKIM 2025